

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA BIDANG PEMBANGUNAN DI  
DESA TELUK PAMAN KECAMATAN KAMPAR KIRI  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**NILDO WIRANSYAH**  
**NPM. 167310172**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

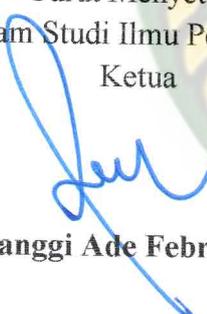
**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Nildo Wiransyah  
Npm : 167310172  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Turut Menyetujui :  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

Pekanbaru, 29 Juli 2021  
Pembimbing

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

  
Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Nildo Wiransyah  
Npm : 167310172  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S-1)  
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pamarintahan Desa Bidang Pembangunan Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan Menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 29 Juli 2021

Ketua

An. Tim Penguji  
Sekretaris



**Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si**

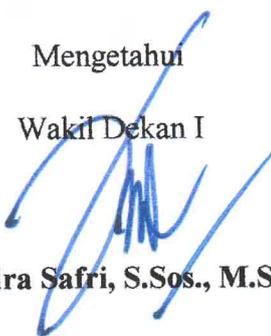
**Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si**

Anggota

  
**Andriyus, S.Sos., M.Si**

Mengetahui

Wakil Dekan I

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

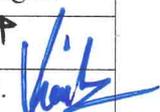
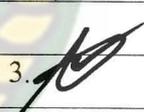
---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 169/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 28 Juli 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 29 Juli 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Nildo Wiransyah  
NPM : 167310172  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : *Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.*

Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos. M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sulaiman, S.IP., Lc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 29 Juli 2021

An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 1169/UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nildo Wiransyah  
N P M : 167310172  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Telukk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.**

Struktur Tim :

1. Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Sulaiman Akmal, Lc., M.IP.	Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 28 Juli 2021  
Dekan,

**Dr. Svahrul Akmal Latif, M.Si.**

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Nildo Wiransyah  
NPM : 167310172  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 29 Juli 2021

Ketua



**Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si**

An. Tim Penguji  
Sekretaris



**Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si**

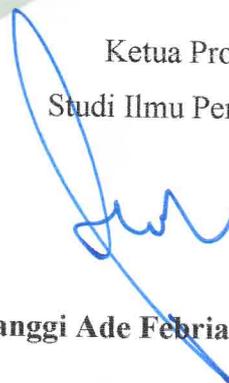
Turut Menyetujui

Wakil Dekan I



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

Ketua Program  
Studi Ilmu Pemerintahan



**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Sos., M.Si**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCI., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.
3. Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan

- kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.
4. Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing yang telah meluangkan dan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  5. Seluruh Dosen dan Staf dari Fakultas Ilmu sosial dan Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Mata Kuliah dan Administrasi dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.
  6. Kepada Bapak Rino Candra selaku Kepala Desa Teluk Paman yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada penulis sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
  7. Terkhusus dan istimewa buat keluarga tercinta Ayahanda Ibusran dan ibunda Hasni serta Adinda Dandri. Dengan pengertian dan kesabaran senantiasa mendoakan, memberi semangat dan dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
  8. Teruntuk Rudi Saputra yang sudah banyak membantu, memberikan dukungan tanpa henti serta motivasi-motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga terselesainya skripsi ini.
  9. Kepada seluruh sahabat dan teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu saya mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan selama penulisan skripsi ini berlangsung.

Dalam penulis skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Hal ini keterbatasan kemampuan dan cakrawala berpikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun dari Bapak/Ibu Dosen selaku pembimbing dan penguji. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, ..... Juni 2021

Penulis

**NILDO WIRANSYAH**  
NPM. 167310172

## DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan Pembimbing .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	viii
Daftar Lampiran .....	ix
Surat Pernyataan .....	x
Abstrak .....	xi
Abstract .....	xii
<b>BAB I Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II Studi Kepustakaan dan Kerangka Pemikiran</b>	
2.1 Studi Kepustakaan .....	15
2.2 Kerangka Pikir .....	45
2.3 Hipotesis .....	48
2.4 Konsep Operasional .....	53
2.5 Operasional Variabel .....	55
<b>BAB III Metode Penelitian</b>	
3.1 Tipe Penelitian .....	61
3.2 Lokasi Penelitian .....	62
3.3 Key Informan dan Informan .....	62
3.4 Teknik Penarikan Informan .....	63
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	64
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	64

3.7 Analisis Data .....	66
3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian .....	66

#### **BAB IV Gambaran Umum Tempat Penelitian**

4.1 Sejarah Berdirinya Desa Teluk Paman .....	69
4.2 Keadaan Penduduk .....	70
4.3 Agama/Keyakinan .....	71
4.4 Gambaran Umum Demografis .....	72
4.5 Pendidikan .....	73
4.6 Struktur Desa .....	74

#### **BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan**

5.1 Identitas Responden .....	75
5.2 Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar .....	77
5.3 Hasil Penelitian dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar .....	93

#### **BAB VI Penutup**

6.1 Kesimpulan .....	95
6.2 Saran .....	96

#### **Daftar Pustaka**

#### **Lampiran-lampiran**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tingkat Kehadiran Peserta Rapat yang Diundang Dalam Beberapa Kegiatan Musyawarah /Rapat Rencana Pembangunan Desa di Desa Teluk Paman 2019-2020.....	8
1.2 Program Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Teluk paman 2019 .....	9
2.2 Peneletian Terdahulu dengan Permasalahan yang Relatif Sama .....	48
2.3 Operasional Variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.....	56
3.1 Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar .....	67
4.1 Jumlah Penduduk Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar .....	70
4.2 Jumlah Penduduk Desa Teluk Paman Berdasarkan Umur .....	71
4.3 Jumlah Sarana Ibadah Penduduk Desa Teluk Paman .....	71
4.4 Tingkat Pendidikan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerang pikir Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar .....	47
4.1 Struktur Organisasi Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar .....	74

## Daftar Lampiran

1. Dokumentasi Wawancara
2. Dokumentasi Observasi
3. Rekap Hasil Wawancara
4. Rekap Data Observasi



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Seminar Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nildo Wiransyah  
NPM : 167310172  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar Skripsi ini beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak hanya plagiat) yang saya tulis sesuai mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juli 2021  
Pelaku Pernyataan

**Nildo Wiransyah**

**Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang  
Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri**

**Kabupaten Kampar**

Oleh

**NILDO WIRANSYAH**

NPM. 167310172

**ABSTRAK**

Pembangunan didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam upaya perubahan tersebut tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang terencana. Kegiatan yang terencana tersebut tidak terlepas dari partisipasi pihak-pihak terkait, contohnya partisipasi masyarakat dalam sebuah penyelenggaraan di suatu desa. Tujuan pembangunan di Desa Teluk Paman adalah untuk membantu dan memudahkan masyarakat. Tipe penelitian yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Key informan penulis dalam penelitiann ini adalah Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa Teluk Paman. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman masih kurang berpartisipasi dan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar terdapat beberapa hambatan yang di hadapai, yaitu: 1) Kurangnya Kesadaran/Kepedulian Masyarakat, 2) Kesenjangan Sosial, 3) Tingkat Pendidikan, 4) Tingkat Penghasilan. Asumsi umum adalah masyarakat yang memiliki penghasilan cukup akan lebih memiliki waktu luang dan tidak disibukkan lagi mencari tambahan penghasilan, sehingga mereka lebih aktif terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan Desa.

**Kata Kunci** : *Partisipasi Masyarakat, Pembangunan, Pemerintahan Desa*

**Community Participation in the Implementation of Village Government  
Development in Teluk Paman Village, Kampar Kiri  
District, Kampar Regency**

By  
**NILDO WIRANSYAH**  
NPM. 167310172

**ABSTRACT**

Development is defined as a process of change to achieve a better condition than before. In an effort to change it can not be separated from a series of planned activities. These planned activities cannot be separated from the participation of related parties, for example community participation in an organization in a village. The purpose of development in Teluk Paman Village is to help and facilitate the community. The type of research used by the author in this study is to use qualitative methods, qualitative research aims to describe the real situation. The key informants in this research are the Village Government and the Teluk Paman Village Community. Data collection techniques used in this research is to use the method of observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, it can be concluded that community participation in the implementation of development in Teluk Paman Village is still lacking in participation and there are still several obstacles in its implementation. Community participation in the implementation of development in Teluk Paman Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency has not fully run optimally. In carrying out the implementation of development in Teluk Paman Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency, there are several obstacles faced, namely: 1) Lack of Community Awareness / Concern, 2) Social Inequality, 3) Education Level, 4) Income Level. The general assumption is that people who have sufficient income will have more free time and are no longer busy looking for additional income, so they are more actively involved in development, for example in attending village meetings.

**Keywords** : *Community Participation, Development, Village Government*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses untuk menuju perubahan agar lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan bukan hanya tentang tentang sebuah benda tapi ada juga pembangunan tentang sikap dan sifat agar semakin baik seiring berjalannya waktu. Sikap yang baik akan menghasilkan sebuah karakter yang baik. Sifat tersebutlah yang membimbing seseorang atau kelompok menjalani proses kehidupan, salah satunya yaitu sikap social yang tinggi untuk sebuah kegiatan.

Membangun karakter yang tersebut bukan hanya di bangku pendidikan saja, di kehidupan bermasyarakat juga kita juga dituntut untuk mempunyai jiwa social yang baik. Saling tolong-menolong adalah salah satu contohnya. Partisipasi merupakan salah satu penilaian bagaimana seseorang atau masyarakat mempunyai karakter yang baik.

Pembangunan juga merupakan sebuah tahapan perencanaan untuk sebuah perubahan. Perubahan tersebut harus melalui sebuah kegiatan yang terencana, Perencanaan dimaksudkan agar kegiatan yang dilaksanakan di masa yang akan datang dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Agar perubahan yang dilakukan dapat mencapai sasaran dan tujuan maka harus didukung dengan potensi yang ada, di antaranya sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya modal.

Pembangunan merupakan suatu usaha masyarakat dalam melakukan perubahan di berbagai bidang kehidupan agar menjadi lebih maju berdasarkan pandangan atau aspirasinya sendiri. Hal tersebut menekankan kepada kita bahwa pembangunan bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja melainkan tanggungjawab semua elemen negara termasuk masyarakat sebagai stakeholder.

Jika dilihat dari konteks pembangunan maka partisipasi dalam pembangunan berarti keikutsertaan atau keterlibatan dalam sebuah proses pembangunan. Pembangunan dengan cara mengikutsertakan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan potensi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi agar pembangunan yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal itu dilakukan dengan caramengikutsertakan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Jadi, pada akhirnya masyarakat bukanlah obyek yang hanya sebagai penerima program pembangunan melainkan masyarakat sebagai subyek yang melakukan pembangunan itu sendiri. Keberhasilan suatu pembangunan sangat dipengaruhi oleh proses perencanaan karena perencanaan merupakan tahap awal dan dasar dari proses pembangunan. Perencanaan memuat berbagai hal tentang apa yang akan dan harus dilaksanakan di masa yang akan datang, sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan salah satu instrumen yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 1 ayat 3 menyatakan sebagai berikut.

“SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.”

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa harus ada keselarasan antara perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan di tingkat pusat berguna sebagai pedoman perencanaan di tingkat daerah dan perencanaan di tingkat daerah menjadi masukan terhadap perencanaan di tingkat pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 1 menyatakan sebagai berikut :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pernyataan tersebut, menjelaskan bahwa desa juga mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal tersebut menandakan bahwa desa diberikan wewenang untuk melaksanakan pembangunan sesuai

dengan inisiatif, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Setiap pembangunan yang di selenggarakan dimulai dari tahap perencanaan, begitu juga halnya dengan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 79 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan desa harus berpedoman kepada perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan daerah harus berpedoman kepada perencanaan pembangunan pusat. Sedangkan perencanaan pembangunan dari tingkat bawah berguna sebagai masukan kepada pemerintah di atasnya. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan pembangunan ditingkat pusat, daerah dan desa, dengan menggunakan sistem perencanaan Top Down dan Bottom Up seperti ini diharapkan pembangunan akan lebih efektif.

Secara umum, motivasi di balik membangun suatu bangsa selesai atas bantuan pemerintah daerah, seperti halnya dengan Wilayah Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa motivasi Pemajuan Umum Negara Indonesia adalah untuk menjamin segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan bantuan pemerintahan umum, mencerdaskan kehidupan negara, dan ikut serta menyelesaikan permintaan dunia. Untuk memahami tujuan tersebut, maka dilakukanlah kemajuan masyarakat, khususnya kemajuan pribadi Indonesia secara keseluruhan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memahami tujuan kemajuannya hendaknya memperluas segala kemungkinan yang wajar yang dapat diselidiki, diciptakan dan digunakan serta dapat diharapkan. Demikian pula

dengan potensi manusia sebagai populasi yang sangat besar, informasi dan kemampuan harus ditingkatkan sehingga mereka dapat menyelidiki, menciptakan dan menggunakan potensi yang normal. Berbagai rencana dan proyek perbaikan sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan telah dibuat dan dilaksanakan di kabupaten-kabupaten, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui organisasi vertikal di daerah, maupun otoritas publik itu sendiri. Salah satu program otoritas publik adalah perbaikan yang dilakukan oleh daerah secara bebas, atau oleh yayasan non-administrasi lainnya yang memiliki program kemajuan sebagai penguatan daerah.

Tujuan program peningkatan pada setiap organisasi termasuk otoritas publik dapat diketahui dengan menerapkan contoh administratif dalam administrasi perbaikan. Contoh administrasi diajukan dengan tujuan agar konsekuensi kemajuan dan proyek pemerintah lainnya dapat dirasakan dan diapresiasi oleh daerah setempat. Dalam pelaksanaannya, yang diperlukan adalah kesadaran dan kerjasama yang dinamis dari seluruh daerah dalam mendukung efektifitas pelaksanaan program perbaikan. Selanjutnya, pengaturan pemerintah diharapkan dapat mengarahkan dan mengontrol daerah untuk saling melaksanakan program perbaikan. Selain itu, pelaksanaan program perbaikan ini juga harus mengikutsertakan area privat sehingga ada energi kerjasama yang dapat diterima antara ketiganya, khususnya otoritas publik, area privat, dan area lokal dengan menerapkan standar administrasi yang baik. Dukungan daerah merupakan modal dasar dengan tujuan tercapainya fokus program pemerintah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencapaian dalam mencapai tujuan

pelaksanaan program-program kemajuan tidak semata-mata didasarkan pada kemampuan aparat pemerintah, tetapi di sisi lain diidentikkan dengan upaya memahami kapasitas dan keamanan daerah untuk berkepentingan dalam pelaksanaan perbaikan. program. Kehadiran penanaman modal daerah sebenarnya ingin mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan otoritas publik untuk menyelesaikan pelaksanaan program perbaikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 Pasal 126 tentang Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pendamping Masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan :

1. Mendorong partisipasi masyarakat daalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa.
2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa.
3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan local.
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal.

5. Mengembangkan system transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa.
6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat.
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa.
8. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa.
9. Melakukan pendamping masyarakat Desa yang berkelanjutan.
10. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Desa Teluk Paman merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, salah satu desa yang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan. Oleh karena itu sebagai desa yang melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan tidak lepas dari peran partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap pengawasan. khusus di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri dengan masyarakat yang beragam-ragam mata pencahariannya yang terdiri mulai dari petani, peternak dan pegawai bahkan wiraswasta sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan. Oleh karena itu di setiap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan hanya sebagian kecil masyarakat Teluk Paman yang ikut serta berpartisipasi dalam program

pembangunan infrastruktur jalan dikarenakan suatu pekerjaan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap pelaksanaan program pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah desa. Adapun bentuk partisipasi yang dimaksud seperti keikutsertaan dalam kegiatan gotong royong, partisipasi dalam rapat, partisipasi dalam memberikan gagasan dalam pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, akan tetapi realita yang terjadi di lapangan menunjukkan masih rendahnya partisipasi masyarakat Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar hal ini di tandai dengan rendahnya tingkat kehadiran masyarakat saat di adakannya kegiatan gotong royong oleh pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari data berikut:

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Kehadiran Peserta Rapat yang Diundang Dalam Beberapa Kegiatan Musyawarah /Rapat Rencana Pembangunan Desa di Desa Teluk Paman 2019-2020**

No	Pelaksanaan kegiatan	Undangan	Hadir
1.	Pembangunan MCK	80 Undangan	20 Undangan
2.	Pembangunan Drainase	80 Undangan	16 Undangan
3.	Semenisasi Jalan Desa	80 Undangan	24 Undangan
4.	Pembangunan Dermaga	80 Undangan	17 Undangan
5.	Rapat HUT 74	80 Undangan	22 Undangan

*Sumber : Kantor Kepala Desa Teluk Paman 2020*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam setiap kegiatan musyawarah /rapat tingkat kehadiran masyarakat selalu rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa

tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang di adakan Desa masih tergolong rendah, dan kurang peduli terhadap pembangunan desa.

**Tabel 1.2**  
**Program Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Teluk paman 2019**

No	Jenis Pembangunan	Jumlah	Anggaran
1	MCK Dusun II Mu'alimin	1 Unit	DD
2	Dermaga Dusun III	1 Unit	DD
3	MCK Dusun IV Suka Menanti	1 Unit	DD
4	Grenasi Setiap Dusun	4 Unit	DD

*Sumber : Kantor Kepala Desa Teluk Paman 2020*

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat pembangun fisik dan non fisik yang dilaksanakan di Desa Teluk Paman tahun 2019, hal ini masih belum sesuai dengan Usulan dari Masyarakat dusun. sedangkan pembangunan poskamling, Gapura dan Jalan Tani masih belum terlaksana. Sementara itu semua pembangunan non fisik sudah terlaksana.

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi sebagian besar sumber daya pembangunannya adalah swadaya masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala yang didapati dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yaitu partisipasi masyarakat.

Dari masalah yang dipaparkan diatas peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan di desa Teluk Paman masih tergolong kurang atau rendah karena dimana kesadaran dan kepedulian

masyarakat dalam menghadiri rapat musyawarah atau pertemuan-pertemuan untuk membahas dan menghasilkan suatu program kegiatan pembangunan infrastruktur desa hanyalah beberapa orang perwakilan masyarakat saja.

2. Faktor usia, orang lebih tua lebih dianggap lebih berpengalaman tentang sebuah persoalan. Sehingga ide/pendapat yang lebih tua lebih di jadikan sebuah keputusan dalam suatu musyawarah.
3. Faktor tingkat pendidikan dan keaktifan berpartisipasi masyarakat menyarankan, penulis mengilustrasikan bahwa sebagian besar masyarakat yang tergolong aktifitas partisipasinya tinggi berurutan ialah mereka yang tamat SLTA keatas, kemudian tamat SLTP dan keaktifan berpartisipasi rendah ditunjukkan oleh masyarakat yang berlatar belakang tamat SD dan tidak sekolah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi latar belakang pendidikan masyarakat, semakin tinggi keaktifan berpartisipasi dalam Musrenbangdes di Desa Teluk Paman. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat berpengaruh terhadap usaha-usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Sedangkan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan.
4. Tingkat penghasilan, hal ini menunjukan bagaimana masyarakat yg hidupnya berkecukupan lebih partisipasi aktif dari pada masyarakat golongan menengah kebawah. Masyarakat yang berkecukupan bisa lebih aktif dalam mengikuti Musrenbangdes dari pada masyarakat golongan

menengah kebawah yang lebih mementingkan kehidupan pribadinya, bila dilihat dari tingkat penghasilan masyarakat. Hasil penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian yang pernah ada. Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat di karenakan masyarakat yang memiliki penghasilan cukup akan lebih memiliki waktu luang dan tidak disibukkan lagi mencari tambahan penghasilan, sehingga mereka lebih aktif terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan Desa.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai yang di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul: ***“Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang di hadapi yaitu :

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa bidang pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa bidang pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui hambatan, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa bidang pembanguna di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat khususnya mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk mahasiswa yang menggeluti studi keilmuan bidang ilmu pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan manfaat bagi Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri dan dapat memberi stimulant bagi penelitian sejenis.

3. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah, serta dapat melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah pembangunan Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep penelitian maka penulis akan memaparkan beberapa teori yang sesuai dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan infrastruktur di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”. Adapun teori yang di gunakan adalah teori yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Bahasa kata Pemerintahan berasal dari kata Perintah yang berarti sesuatu yang harus di kerjakan atau di laksanakan. Sedangkan menurut istilah Pemerintahan adalah aktivitas atau kegiatan yang di selenggarakan oleh suatu subjek yaitu Organisasi, Lembaga dan Pejabat-Pejabat Pemerintahan dalam suatu Negara.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengkaji masalah-masalah persoalan, organisasi, pengurus dan wewenang dalam organisasi perhimpunan publik atau badan publik yang bertanggung jawab untuk melakukan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mampu menguasai dan memimpin hubungan antara Dinas-Dinas yang memiliki hubungan dengan masyarakat dan hubungan keserasiannya yang semua kepentingannya ada pada Dinas tersebut (musanef, 1985).

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar (Syafiie 2011:23).

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu dinas dalam menjalankan fungsinya dan bagaimana mempelajari hubungan dinas sebagai penyelenggara Pemerintahan baik hubungan dengan sesama dinas maupun dengan masyarakatnya.

Konsep Ilmu Pemerintahan menurut Taliziduhu (Ndaraha, 1997: 1) mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah dalam hal ini adalah unit kerja publik yang bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan yang di perintah akan jasa publik dan layanan publik dalam hubungan pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas dapat di peroleh pokok pemahaman tentang ilmu pemerintahan di antaranya yaitu:

- a. Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang mengkaji permasalahan-permasalahan dalam organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi publik.
- b. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari prosedur, struktur dan serangkaian kegiatan badan-badan publik dalam melaksanakan fungsi dan tugas suatu lembaga untuk mencapai tujuan negara.

- c. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari suatu proses pencapaian tujuan penyelenggaraan negara yang di dasarkan pada kepentingan dan harapan warga negara yaitu masyarakat dan oleh sebab itu ilmu pemerintahan mempelajari kegiatan pemerintahan sebagai kegiatan pengaturan dan kegiatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan yang di maksud dengan pemerintahan menurut ndaraha (ndaraha, 2003) menyebutkan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem multi proses yang bertujuan melindungi dan memenuhi kebutuhan akan jasa publik dan pelayanan sipil. Sedangkan pemerintah adalah yang memiliki wewenang mengelola pelayanan publik dan pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah. Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa pemerintah memiliki 3 fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu:

- Fungsi pembangunan
- Fungsi pemberdayaan
- Fungsi pelayanan

Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di indonesia yang berlandaskan demokrasi, pemerintah tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya dukungan dari masyarakat.

Sarundajang (2002:5) Mengatakan bahwa kehadiran dan keberadaan pemerintahan adalah menjadi suatu keharusan bagi proses kewajiban masyarakat. Sejarah telah menunjukkan bahwa masyarakat baik dalam bentuk kelompok maupun individu sangat membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karenanya

dalam kehidupan sehari-hari sangat erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah.

Manan (2001:101) Dalam pengertian pemerintahan di artikan sebagai alat kelengkapan negara, dapat di artikan ke dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas pemerintahan adalah alat kelengkapan negara yang terdiri lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif yang bertindak di atas nama negara. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan adalah alat kelengkapan negara yang menyelenggarakan administrasi negara.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan benar atau wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin moderen dengan di tandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian menjadi pelayan masyarakat. Pemerintahan moderen berarti pemerintahan yang tidak hanya melayani diri sendiri tetapi pemerintahan yang untuk melayani masyarakat sehingga masyarakat dapat mengembangkan kreatifitas dan kemampuannya dalam mencapai kemajuan bersama (2000:13). Pemerintahan yang demokratis lahir sebagai pelayan masyarakat dan karena itu pemerintahan selalu mencari cara untuk menyenangkan warganya.

## **2. Konsep Pemerintahan Daerah**

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2014 Pasal 1 di sebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah itu berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya yaitu urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan fungsi pokok pemerintahan yaitu pelayanan, pembangunan, pengaturan dan pemberdayaan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggara negara
- c. Kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proposionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efisiensi
- i. Efektivitas
- j. Keadilan

Menurut Manan (2005:37-38) kewenangan otonomi yang luas adalah kebebasan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang meliputi berbagai bidang di dalam pemerintahan selain bidang politik, luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang di tetapkan dengan pemerintah, selain keleluasaan otonomi terdapat pula kewenangan yang utuh dan mengikat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Dalam pengertian pertama Pemerintahan lokal berarti penyelenggara pemerintahan yang terdiri dari badan, organisasi maupun lembaga. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah lokal adalah orang yang mempunyai wewenang memimpin setiap pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam pengertian kedua pemerintahan lokal mempunyai arti berbagai kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan untuk pengertian yang ketiga pemerintahan lokal adalah wilayah pemerintahan atau daerah otonom yaitu daerah yang mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga daerahnya.

Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah, terdapat beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sendiri.

b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah, atau kepada instansi vertikal tingkat atasnya, kepada pejabat-pejabat di daerah.

c. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah asas untuk turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atas dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Dengan demikian dapat di katakan bahwa konsep pemerintahan daerah di dalamnya terdiri dari organisasi, lembaga, instansi, dan kegiatan yang ada dalam suatu daerah pemerintahan.

### **3. Konsep Kebijakan**

Menurut James E. Anderson (dalam Dwiyanto 2009:17) kebijakan adalah perilaku dari setiap pejabat, kelompok maupun instansi pemerintah dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Kemudian menurut Titmus (dalam Suharto 2014:7) mengemukakan bahwa kebijakan adalah segala tindakan yang di atur oleh prinsip-prinsip untuk mengarah ke tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmus lebih berorientasi kepada masalah-masalah dan kepada tindakan-tindakan.

Selanjutnya menurut Carl Frierich (dalam Leo Agustino 2012:7) kebijakan adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang di ajukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu.

Menurut Nugroho (dalam Arifin Tahir 2014:26) kebijakan adalah aturan yang mengikat suatu masyarakat dan harus di taati karna mengatur suatu kehidupan masyarakat.

Sedangkan menurut Tangkisan (2003:6) kebijakan merupakan suatu aktifitas yang telah di arahkan pada suatu tujuan dan memiliki ciri tersendiri dari segi aktifitas fisik dan perspektif murni yang memiliki tujuan untuk masa depan yang di kehendaki.

Dari beberapa konsep kebijakan di atas menunjukkan bahwa pejabat pemerintah dalam membuat kebijakan harus memperhatikan unsur tujuan dan sarana yang harus ditetapkan terlebih dahulu. Dengan demikian kebijakan berkaitan dengan cara dan sasaran yang dibuat untuk mencapai tujuan.

Dari berbagai pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa kebijakan adalah suatu bentuk ketetapan atau keputusan yang sengaja di buat yang di dalamnya berisi aturan-aturan serta mengatasi masalah dan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

#### **4. Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan keputusan pemerintahan dalam proses pembangunan. Suatu kebijakan publik akan terasa penting apabila telah di jalankan dan di mengimplementasikan. Karna pengimplementasian

merupakan aspek terpenting dalam kebijakan pemerintah selain aspek formulasi dan evaluasi.

Menurut Carl Friedrich (dalam Santoso 2008:35) mendefinisikan bahwa kebijakan-kebijakan publik adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pemerintah yang telah di arahkan dan mempunyai tujuan untuk mencapai sasaran yang telah di tetapkan.

Kemudian menurut Santoso dalam (Nugroho, 2006) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan petunjuk-petunjuk yang di perlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Nugroho ada dua karakteristik di kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk di pahami, yang bermakna bahwa setiap hal-hal yang di kerjakan adalah untuk mencapai tujuan nasional.
- b. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, artinya kebijakan publik di gunakan untuk mencapai kemajuan pencapaian cita-cita yang sudah di tempuh.

Kemudian Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkisilan (2003:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah yang ada di dalam pemerintah maupun politik. Kebijakan publik adalah sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah politik.

Dalam pembuatan kebijakan publik harus memperhatikan unsur-unsur yang harus di perhatikan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yaitu:

- a. Jumlah orang yang ikut mengambil kebijakan publik, artinya bahwa dalam proses pembuatan kebijakan publik seorang pejabat dapat membuat kebijakan secara individu maupun secara bersama sama.
- b. Peraturan yang mengatur dalam pengambilan kebijakan publik, yang di maksud dengan peraturan pembuat kebijakan publik adalah ketentuan yang mengatur mengenai jumlah orang maupun penentuan suatu kebijakan.
- c. Informasi, dalam pembuatan kebijakan publik kelengkapan dan keakuratan dalam informasi mempengaruhi isi kebijakan publik yang di ambil.

Berdasarkan beberapa konsep kebijakan publik di atas dapat di simpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala tindakan yang di lakukan atau yang tidak di lakukan pemerintah yang beorientasi pada tujuan tertentu untuk memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan publik tertuang di dalam peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mengikat.

## **5. Konsep Partisipasi**

### **5.1 Konsep Partisipasi**

Konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Mardikanto (2014) adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Masih menurut Mardikanto (2014) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari suatu kegiatan untuk memperoleh manfaat, menurut

kamus sosiologi tersebut bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri dalam Yuwono (2006). Definisi yang ada dan berlaku universal, yaitu partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerja sama yang erat antara perencana dan rakyat dalam pengambilan keputusan, melaksanakan, evaluasi, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai Soetrisno (1995).

Davis dalam Sastropetro (1986) mengemukakan jenis-jenis partisipasi adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi menggunakan pikiran (*psycological partisipation*)
- b. Partisipasi menggunakan tenaga (*physical partisipation*)
- c. Partisipasi menggunakan pikiran dan tenaga (*activepartisipation*)
- d. Partisipasi menggunakan keahlian (*with skill partisipation*)
- e. Partisipasi menggunakan barang (*material partisipation*)
- f. Partisipasi menggunakan uang (*money partisipation*)
- g. Partisipasi menggunakan jasa (*services partisipation*)

Dusseldorp (1998) dalam Yuwono (2017) mengatakan perbedaan partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaannya, sebagai berikut:

- a. Partisipasi spotan, yaitu partisipasi yang terbentuk secara spontan dan tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, atau keyakinannya sendiri, tanpa adanya pengaruh yang diterimahnya dari penyuluhan atau bujukan yang dilakukan oleh pihak lain.

- b. Partisipasi diminta, yaitu partisipasi yang tumbuh karena diminta oleh adanya motivasi ekstrinsik ( berupa bujukan, pengaruh, dorongan, penyuluhan) dari luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi. Motivasi ekstrintik tersebut bisa berasal dari pemerintah, lembaga masyarakat, maupun lembaga sosial setempat atau individu.
- c. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu partisipasi yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat umumnya.
- d. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial ekonomi, yaitu yang dilakukan karena ketakutan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.
- e. Partisipasi terkekang oleh peraturan, yaitu partisipasi yang dilakukan karena di kekang oleh peraturan dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan.

Telaah tentang partisipasi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa partisipasi, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan atau keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam maupun dari luar dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pemanfaatan hasil yang di capai. Totok Mardikanto dan Subianto (2015:83,84) mengemukakan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdiri atas :

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dapat diukur dari : 1) Keterlibatan dalam rapat atau musyawarah, 2) Kesiediaan dalam Memberikan Data dan Informasi, 3) Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Partisipasi dalam pembangunan, sering kali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dapat di ukur dari : 1) keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, 2) kesedian memberikan sumbangan berupa pikiran, 3) kesedian memberikan sumbangan uang, materi dan bahan-bahan penunjang pembangunan.
- c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Maka di dalam menilai tingkat keterlibatan masyarakat memerlukan pengawasan dan juga evaluasi. Diantaranya adalah pertama, adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan, kedua, keaktifan dalam melakukan pengawasan, dan ketiga, pemberian kritik dan saran dari masyarakat.

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil merupakan unsur terpenting yang sering dilupakan sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Dimensi keterlibatan dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan meliputi : 1) kesediaan dalam menerima dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, 2) kesediaan dalam melestarikan hasil-hasil pembangunan, 3) kesediaan dalam mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Dari sebagian pengertian di atas, dapat diduga bahwa investasi adalah penyertaan orang atau jaringan, baik secara nyata, nyata maupun tidak nyata, untuk ikut serta dalam suatu tindakan atau afiliasi, baik tanpa hambatan dengan sengaja, secara mendadak dengan persetujuan sendiri, atau atas dasar bahwa mereka digerakkan oleh pengaruh dan pengaruh dari berbagai perkumpulan dengan upaya menuju pencapaian tujuan. Kemudian, pada saat itu, investasi individu yang dikembangkan bukanlah persiapan individu yang dikembangkan. Kepentingan individu yang dikembangkan adalah kerjasama antara individu dengan otoritas publik dalam mengatur, melaksanakan, menjaga, dan membina hasil kemajuan yang telah dicapai.

## 5.2 Definisi Partisipasi

Partisipasi adalah keturutsertaan, perhatian dan sumbangan yang diberikan oleh kelompok yang berpartisipasi, dalam hal ini adalah masyarakat, Pasaribu (1992). Untuk menumbuhkan dan menggerakkan semangat partisipasi, diperlukan prasyarat yang dapat membangkitkan tenaga sosial dalam masyarakat.

Pasaribu (1992) mengemukakan sebagai berikut:

- a. Rasa senasib, sepenanggungan, ketergantungan dan ketertiban, jika dalam suatu masyarakat terdapat perasaan ini, maka dalam masyarakat ikut dapat diharapkan timbul partisipasi yang tinggi.
- b. Keterikatan tujuan hidup, keterikatan rasa saja tidak membawa kekuatan untuk berpartisipasi. Bukti nyata dalam hal ini, makan tidak makan asal rumput tetapi bila tujuan jelas maka ketepatan hati, tahan uji dan kemauan keras akan timbul dalam mencapai tujuan.
- c. Kemahiran menyesuaikan. Kemahiran menyesuaikan diri dalam keadaan sangat penting untuk menimbulkan partisipasi.
- d. Adanya prakarsawan, adanya orang yang memprakarsai perubahan, merupakan memprasyarat lahirnya partisipasi.
- e. Iklim partisipasi, partisipasi yang bagaimanapun tidak akan lahir tanpa lebih dahulu menciptakan iklim tetapi bila iklimnya sudah ada, maka sangat mudah partisipasi tumbuh.

Partisipasi dalam perlombaan politik (dukungan konstituen). Ini adalah jenis kerja sama yang paling mudah untuk dilihat karena itu waras. Latihan minat massal untuk situasi ini muncul untuk memilih agen individu, memilih perintis atau menjalankan filosofi perbaikan tertentu. Mengumpulkan dukungan (kerjasama sekelompok). Warga mengikuti pertemuan tertentu untuk menyuarakan harapan mereka. Pertemuan-pertemuan ini dapat terdiri dari individu-individu yang bekerja sama untuk memerangi kebutuhan, menggerutu

tentang anomali manajerial ke perusahaan terkenal, atau pada dasarnya melindungi kepentingan pertemuan orang-orang yang serupa.

Menurut Keith Davis dalam Sastropetro (1998) Partisipasi adalah sebuah bentuk keterlibatan mental/pikiran dan emosi atau perasan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Menurut pemahaman umum, partisipasi mensyaratkan adalah akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kontribusi terhadap upaya pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Jadi partisipasi masyarakat mencakup semua aspek interaksi antara masyarakat dan pemerintah.

Partisipasi pada dasarnya terbagi dua yaitu partisipasi sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang disebut partisipasi horizontal dan partisipasi yang dilakukan bawahan dengan atasan, antara klien dan patron atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah dalam berbagai kegiatan politis secara pemungutan suara, kampanye dan sebagainya disebut sebagai partisipasi dalam proses politik. Sedangkan keterlibatan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan disebut partisipasi dalam proses administrative (Slamet :1999).

Konsep partisipatif mengandung makna luas dan arti yang amat dalam, dimana pada proses pembangunan partisipasi itu berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Sebagai masukan partisipasi dapat berfungsi pada fase penerimaan informasi, fase pemberian tanggapan terhadap informasi, fase perencanaan

pembangunan, fase pelaksanaan pembangunan, penerimaan kembali hasil pembangunan dan fase penilaian pembangunan, sehingga partisipasi berfungsi menumbuhkan masyarakat untuk berkembang secara mandiri.

Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap pengembangan masyarakat dimana-mana, seolah-olah menjadi "lebel baru" yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktikkan sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikutserta keterlibatan, atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Partisipasi masyarakat daerah yang sedang dikembangkan, tertarik untuk dikembangkan mengatur latihan dan ikut serta dalam pemanfaatan dan menghargai akibat dari kemajuan.

Mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan penggunaan masyarakat yang demokratis yaitu:

- a. Partisipasi politik (*political participation*), partisipasi lebih berorientasi pada "mempengaruhi" dan "mendudukan wakil-wakil rakyat" dalam lembaga pemerintahan ketimbang aktif dalam proses –proses pemerintahan itu sendiri.
- b. Partisipasi sosial (*social participation*), partisipasi ditempatkan sengaja keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan

keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses partisipasi sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik diarahkan sebagai bahan pembelajaran dan mobilisasi sosial.

- c. Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*), menekan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi “ dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma, kaum tersisi” menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Berdasarkan uraian pendapat diatas, maka yang dimaksud dengan partisipasi dalam penelitian ini adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan keputusan pembangunan, pelaksanaan perencanaan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

### 5.3 Bentuk Partisipasi

Terdapat beberapa macam bentuk partisipasi, yang bergantung kepada situasi dan keadaan keperluan partisipasi tersebut. Menurut Keith Davis dalam Sastropetro (1998:55 ) bentuk partisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Konsultasi dalam bentuk jasa.

- b. Sumbangan spontan berupa uang atau barang.
- c. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dananya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berasal dari luar lingkungan tertentu (dermawan/pihak ketiga).
- d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh seluruh komuniti (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti, rapat desa yang menentukan anggaranya).
- e. Sumbangan dalam bentuk kerja, biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat.
- f. Aksi masa.
- g. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri.
- h. Membangun proyek komuniti yang bersifat otonomi.

Mengenai bentuk dan tahap partisipasi dapat dilihat dari sebagian pendapat sebagai mana rangkuman Ndraha (1990) berikut ini:

- a. Partisipasi dalam melalui kontak lain sebagai salah satu bentuk titik awal perubahan.
- b. Partisipasi dalam bentuk memperhatikan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima, mentaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termaksud dalam pengambilan keputusan rencana. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditimbulkan sedini mungkin di dalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan

politik yang menyangkut mereka, partisipasi yang bersifat teknis/desain proyek.

- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- e. Partisipasi dalam penerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
- f. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berbagai bentuk, jenis dan model-model partisipasi seperti disebutkan diatas dapat diimplementasikan apabila implementor (*public actors dan social actors*) memperhatikan secara sungguh-sungguh intensif-intensif materil sekaligus moral yang dapat dipetik sebagai buah dari partisipasi yang mereka berikan. Dalam konteks ini faktor-faktor yang sangat berpengaruh baik secara psikologis maupun kultural terhadap kualitas partisipasi yang berpengaruh secara timbal balik antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan uraian diatas pendapat para ahli, maka bentuk-bentuk partisipasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam memberikan Pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi, pemanfaatan hasil.

## 6. Konsep Masyarakat

Gagasan masyarakat adalah semua perilaku manusia yang dianggap pantas. Tidak menyalahgunakan standar dan kebiasaan umum dan langsung menyatu dengan perilaku masyarakat secara keseluruhan. Konsep tentang

masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang hidup masing-masing di suatu tempat dengan prinsip dan cara tertentu. Orang, keluarga, dan pertemuan kecil adalah individu dari masyarakat umum. Organisasi terdekat ada di antara individu-individu ini, terutama melalui pemberian bersama. Contoh hubungan sosial yang diulang menyerupai partisipasi bersama, kesamaan afiliasi ini mendorong kekompakan secara lokal sebagai unit sosial.

## 7. Konsep Pembangunan

Intisari dari kemajuan adalah interaksi yang konsisten dari kemajuan yang merupakan kemajuan dan peningkatan menuju arah yang akan dicapai, selanjutnya untuk memberikan ini. Siagian (1994), memberikan definisi yang sebagai berikut :

“Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.” (Siagian, 1994).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan itu sendiri terdapat inti pokok-pokok pengertian sebagai berikut :

- a. Pembangunan adalah merupakan suatu proses, berarti suatu keinginan yang terus menerus dilaksanakan.
- b. Pembangunan merupakan usaha sadar yang dilakukan.
- c. Pembangunan mengarah kepada modernitas, yang diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk

lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka peningkatan swasembada dan mengurangi ketergantungan dari pihak lain.

- d. Pembangunan dilaksanakan secara berorientasi pada pertumbuhan dan Perubahan.
- e. Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional.

Lebih lanjut, Bintoro Tjokroamidjojo menjelaskan bahwa: Kemajuan adalah siklus yang kuat, wawasan harus memberikan kebebasan pada kenyataan tetapi harus mengandung kepastian dan kemajuan untuk eksekusi imajiner menuju pengakuan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dengan keridhoan Tuhan.

Makna perbaikan sebagaimana tergambar dalam pernyataan tersebut memberikan kejelasan bahwa kemajuan merupakan interaksi latihan yang dilakukan oleh otoritas publik dan daerah dengan menggunakan kapasitas terpendamnya. Keseluruhan ini diusulkan untuk meningkatkan bantuan pemerintah terhadap kehidupan individu, baik sejauh bantuan dunia lain maupun bantuan pemerintah yang sebenarnya.

Pembangunan sebagai upaya memperbaiki keadaan, dalam arti yang lebih buruk menjadi baik dikemukakan oleh Kirdi dipoyudo bahwa “Pembangunan nasional adalah rangkaian usaha secara sadar berencana untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi program-program pembangunan yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.” Bintoro (1986).

Selain dilihat sebagai upaya memperbaiki keadaan, pembangunan juga dapat dilihat sebagai salah satu jalan untuk mengetahui segala potensi kreatif yang dimiliki oleh masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Jakob Oetama sebagai berikut : “Pembangunan berusaha menggerakkan dan menguatkan potensi kreatif yang ada dalam masyarakat. Untuk merangsang potensi kreatif itu maka pembangunan mempertimbangkan system nilai struktur yaitu hubungan-hubungan dan peranan-peranan yang ada dalam masyarakat.” Jakob (1984).

Kemampuan masyarakat setempat seringkali ditutup-tutupi dan untuk menyadarkannya harus melalui peningkatan. Potensi yang muncul melalui kemajuan ini sekaligus merupakan salah satu komponen yang dapat bekerja dengan peningkatan roda kemajuan. Kemungkinan yang diusulkan adalah sebagai budaya, ekonomi, nilai-nilai dan sebagainya.

#### **8. Perlunya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**

Pencapaian kemajuan masyarakat sebagai aturan dan perbaikan daerah secara khusus tidak hanya ditentukan oleh otoritas publik dan perangkatnya tetapi juga oleh tingkat penerimaan, perhatian dan dukungan dari semua lapisan masyarakat. Investasi adalah mengambil bagian atau mengambil bagian dalam mengumpulkan, mengambil kepentingan dalam melaksanakan dan memikul kewajiban. Mencermati kedua pernyataan tersebut, kita dapat melihat bahwa ada enam hal mendasar yang perlu kita ciptakan jika ingin mendapatkan minat daerah.

Sedang dikembangkan. Enam hal tersebut adalah perhatian, minat, inovasi, pengaturan atau penggabungan dan pelaksanaan. Dengan asumsi enam hal ini diklaim oleh daerah, hal lain yang harus diperhatikan adalah bagian dari inisiatif

yang diterapkan oleh pemerintah kota dan pejabatnya dalam menyelesaikan kemajuan di ruang mereka.

Kepemimpinan perlu dikemukakan disini karena antara partisipasi masyarakat dan kepemimpinan setempat tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan yang lainnya. Bila terpisahnya maka dengan sendirinya akan mengurangi atau bahkan kehilangan kekuatan. Misalnya partisipasi masyarakat besar, namun karena pemerintah desa tidak dapat menerapkan kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi setempat, maka potensi tidak akan pernah diwujudkan seperti yang diharapkan.

Dewasa ini diharapkan partisipasi masyarakat akan muncul dan tumbuh dari bawah sebagai inisiatif dan aktifitas yang lahir dari rasa tanggung jawab warga masyarakat dalam pembangunan pedesaan/kelurahan yang partisipasinya pada dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam keputusan Presiden Republik Indonesia dengan nomor :319/19/1978 dijelaskan bahwa: "Berhasil tidaknya repelita akan tergantung pada banyaknya tanggapan pengertian dan partisipasi rakyat Indonesia dalam meyambut segala tantangan pembangunan ini secara positif guna meratakan jalan bagi cucu dan generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila." Sirajuddin (1991).

Dari penjelasan tersebut, cenderung beralasan bahwa kemajuan yang dicapai selama ini mendorong peningkatan bantuan hidup pemerintah di kemudian hari, terutama untuk masa depan. Reaksi, pemahaman dan kerjasama daerah dalam pelaksanaan perbaikan akan mempercepat pengakuan suatu tujuan. Hal ini

dimungkinkan karena potensi luar biasa yang sedang dikembangkan sangat bergantung pada kemampuan SDM dan juga memiliki kapasitas yang luar biasa.

Dukungan wilayah lokal yang dikembangkan lebih banyak dipengaruhi oleh sikap psikologis itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menarik minat daerah, khususnya di tingkat kota, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengubah sikap psikologis ke arah kemajuan tanpa adanya faktor yang menekan. Kelompok masyarakat juga harus merasa bahwa dikembangkan di sana adalah kebutuhan mereka.

Dukungan semua orang di arena publik adalah kebutuhan mutlak untuk pelaksanaan latihan kemajuan. Kepentingan menyebabkan kolaborasi lokal dan upaya bersama ini membutuhkan koordinasi yang baik dari otoritas, untuk situasi ini direncanakan investasi yang menarik dan produktif.

Koordinasi akan berjalan dengan baik apabila jalur-jalur komunikasi dalam masyarakat berjalan seimbang. Komunikasi yang dimaksudkan adalah komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Dalam masyarakat desa keadaan ini dapat terlaksana dengan baik apabila asas swadaya dan gotong-royong dilaksanakan secara missal dan menyeluruh dalam satu pola tertentu menggambarkan pencerminan kepentingan-kepentingan masyarakat dan individu-individu yang mendukungnya. Dengan demikian apa yang dilaksanakan sebagai proses pembangunan adalah merupakan milik bersama yang harus dipelihara dan tanggung jawabkan demi kesejahteraan bersama.

## 9. Konsep Pembangunan Desa

Menurut buku panduan persatuan bangsa-bangsa pembangunan adalah sebuah proses dimana anggota masyarakat pertama-tama mendiskusikan dan merencanakan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut (Hartoyo dkk. 1996).

Selanjutnya dikatakan pembangunan dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kuat dan kokoh bagi masyarakat di daerah berkembang atas kekuatan dan kemampuan sendiri, sedangkan pemerintah hanyalah bersifat memberi bantuan, pengarahan dan bimbingan serta mengarahkan yang dapat meningkatkan usaha tumbuh dan berkembang dari desa swadaya, swakarya desa swasembada. Beratha (1992) pembangunan adalah suatu pembangunan dari masyarakat unit pemerintah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus, sistematis dan terarah sebagian penting dalam pembangunan Negara sebagai usaha yang menyeluruh.

Apabila kedua definisi tersebut diatas kita analisis sesuai dengan semangat pembangunan dikawasan pedesaan, yang mengutamakan semangat tumbuh dari dalam untuk dan berkembang yang secara mandiri, tidak menunggu uluran tangan dari luar. Dengan demikian, dalam gerak derapnya pembangunan masyarakat desa, desa tidak lagi menjadi objek dalam pembangunan, melainkan menjadi subjek dalam pembangunan.

Sementara itu, garis-garis besar perencanaan pembangunan lima tahun menyebutkan pembangunan masyarakat adalah meningkatkan taraf hidup

masyarakat dengan jalan melakukan pembangunan yang integral dari masyarakat, berdasarkan azas kekuatan sendiri dari masyarakat dengan pembimbing serta bantuan alat-alat pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan (kebutuhan) dalam rangka kebijaksanaan bersama.

Azas pembangunan integral dimaksudkan ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi-segi masyarakat (pertanian, pendidikan, kesehatan perumahan dan sebagainya) sehingga menjamin suatu pembangunan yang selaras dan tidak berat sebelah. Azas kekuatan sendiri ialah bahwa tiap-tiap usaha pertama-tama harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa sendiri, dengan tidak menunggu-nunggu pemberian dari pemerintah. Sedangkan azas pemufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan dalam lapangan yang besar-besar dirasakan sebagai kekuatan oleh anggota masyarakat desa yang bersangkutan, sedangkan putusan itu melaksanakan proyek itu bukannya berdasarkan perintah atasan, melainkan keputusan bersama anggota masyarakat desa.

Ndraha (1990) memberikan kesimpulan-kesimpulan tentang pembangunan sebagai berikut “pembangunan sebagai suatu proses didalam mana masyarakat berkenan mengambil bagian secara aktif atas dengan pendekatan ini berpartisipasi dan memberikan bimbingan, pembinaan, pengarahan, pengawasan dan bantuan.

Berdasarkan batasan atau konsep pembangunan desa yang dikemukakan para ahli tersebut diatas, maka pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berencana untuk seluruh lapisan masyarakat dan bukan untuk golongan tertentu

atau sebagian masyarakat. Oleh karena itu, konsekuensinya dalam realisasi pembangunan desa baik pelaksanaan proyek- proyek pembangunan yang bersifat fisik manfaatnya konsisten berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia masyarakat.

Pembangunan di desa dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka harus diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan dan ruang lingkup pembangunannya. Berikut menjelaskan mengenai ketiga unsur tersebut menurut Adisasmita (2006):

- a. Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan), partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas) dan berkelanjutan (sustainable).
- b. Sasaran pembangunan pedesaan yaitu untuk terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas, percepatan pertumbuhan desa, peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta perkuatan kelembagaan.
- c. Pengembangan pedesaan yang mempunyai ruang lingkup pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan, pemukiman dan lainnya), pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin) dan penataan keterkaitan

antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (interrural-urban relationship).

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab penuh dalam rangka pembangunan desa. Pemerintah kabupaten wajib melakukan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat desa dan memberikan fasilitas kepada masyarakat. menurut Ndraha (1990), membangun desa adalah setiap pembangunan yang ada didalam prosesnya masyarakat desa berpartisipasi aktif. pembangunan desa adalah suatu proses dimana organisasi atau masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudahan mereka merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup, Ndraha (1990).

Tetapi dalam menentukan pembangunan desa ini, banyak sekali hambatan yang dapat ditemui. Hambatan-hambatan itu menurut Ndraha (1990) adalah :

- a. Perbedaan persepsi. Perencanaan pembangunan sering tidak tepat dalam menanggapi antara apa yang pemerintah dengan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dipedesaan. Sehingga terjadi permasalahan dalam pembangunan desa, karena masyarakat desa memiliki persepsi yang buruk terhadap pembangunan yang dilakukan didesanya.
- b. Kesukaran memilih model pembangunan yang tepat. Kesulitan ini muncul karena masyarakat pedesaan itu pada umumnya tertutup dan masih bingung dalam menerima hal-hal baru sehingga pemerintah pun menjadi bingung dalam menentukan model pembangunan apa yang sebaiknya diterapkan bagi masyarakat pedesaan.

- c. Batasan waktu, dimana pembangunan pedesaan\lambat sekali kelihatan hasilnya sehingga pemerintah sering merasa kurang sabar dalam menangani usaha pembangunan desa.
- d. Persoalan praktis. Hambatan ini muncul bila hal-hal dalam tarap pelaksanaanya membuat pembangunan desa terlambat, misalnya saja kurangnya teknologi, kurangnya pengelola yang terlatih dan sebagainya.

Memperhatikan kekurangan dan kegagalan perencanaan pembangunan di desa pada masa lalu, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pendekatan pembangunan di desa atau pedesaan yang sesuai dengan kompleksitas pembangunan serta aspirasi masyarakat.

#### **10. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat**

Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Faktor internal, Menurut Slamet (2003: 137-143) faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan atau penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

- b. Faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu dalam hal ini *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasiliator.

## 2.2 Kerangka Pikir

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 1 ayat 3 menyatakan sebagai berikut. SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 menyetakan sebagai berikut. Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partisipasi Masyarakat Adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat diukur dari 1) keterlibatan dalam rapat atau musyawarah, 2) Kesiediaan dalam memberikan data dan Informasi, 3) Keterlibatan dalam Pengambilan keputusan.

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dapat diukur dari : 1) keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, 2) kesediaan memberikan sumbangan berupa pikiran, 3) kesediaan memberikan sumbangan berupa uang, materi dan bahan-bahan penunjang pembangunan.

Dimensi keterlibatan masyarakat pengawasan dan evaluasi pembangunan meliputi, 1) adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan, 2) keaktifan dalam pengawasan, 3) pemberian kritik dan saran dari masyarakat.

Dimensi keterlibatan dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan meliputi : 1) kesediaan dalam menerima dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, 2) kesediaan dalam melestarikan hasil-hasil pembangunan, 3) kesediaan dalam mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

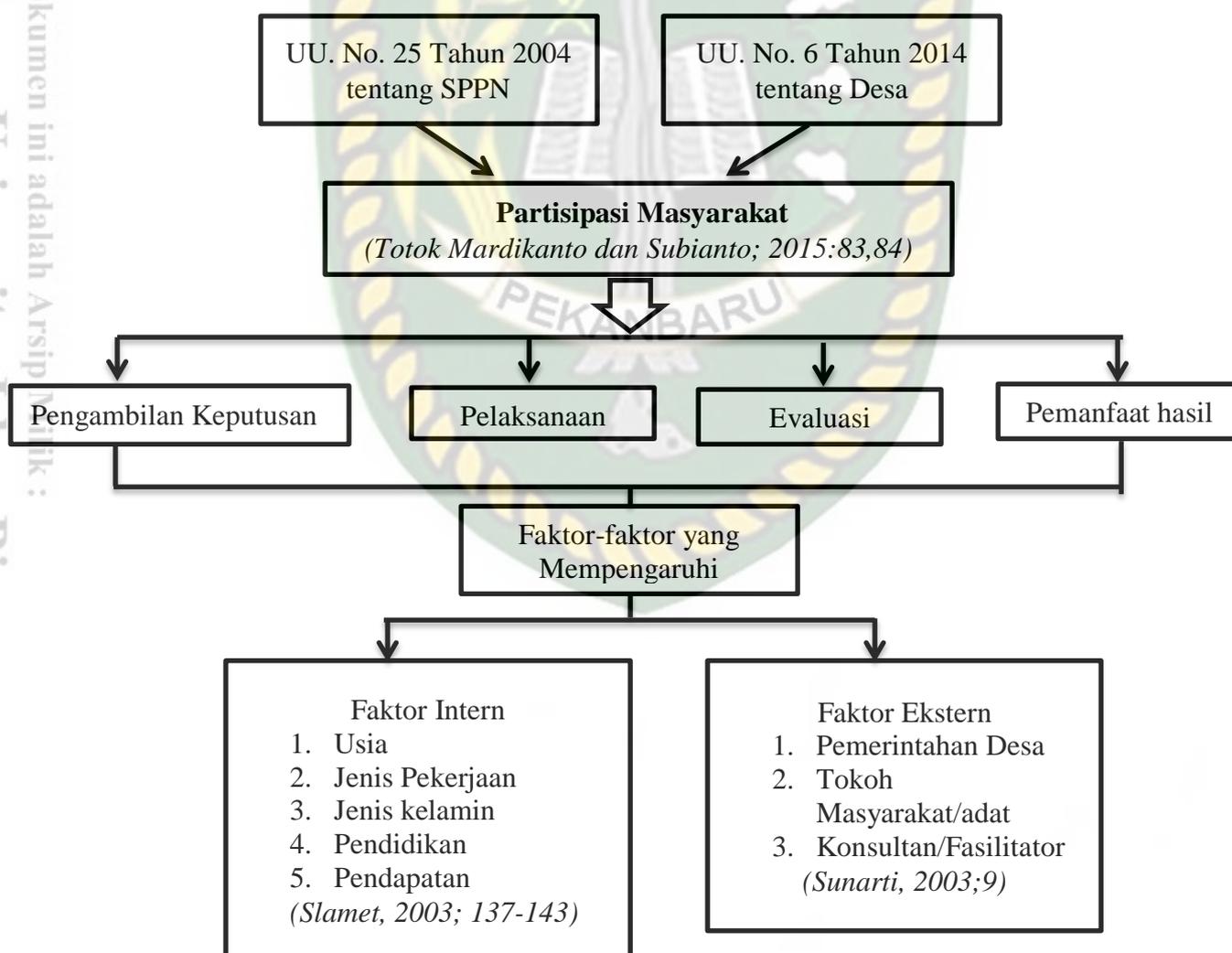
Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Faktor internal, Menurut Slamet (2003: 137-143) faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan atau penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lamanya menjadi anggota

masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

- b. Faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu dalam hal ini *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasiliator.

**Gambar: 2.1**  
**Kerang pikir Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar**



*Sumber: Data Olahan Peneliti 2020*

## 2.3 Hipotesis

Pada penelitian ini membandingkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

**Tabel 2.2**  
**Peneletian Terdahulu dengan Permasalahan yang Relatif Sama**

No	Nama	Judul Penelitian	Konsep	Hasil Penelitian
1.	Martiana Dwi Rahayu	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.	Bentuk Partisipasi (Septyasa, 2013:6), 1. Partisipasi buah pikir. 2. Partisipasi Tenaga. 3. Partisipasi harta benda. 4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran. 5. Partisipasi sosial.	Dalam pembangunan infrastruktur cukup baik, karena masyarakat memberikan bantuan berupa tenaga dan pemikiran. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi

				diantaranya adanya sosialisasi, kesempatan, dan faktor pemimpin.
2.	Yuni Kurniyati	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara.	Bentuk Partisipasi (Theresia,2014:202),  1. Memberikan informasi. 2. Konsultasi. 3. Pengambilan keputusan bersama. 4. Bertindak bersama. 5. Memberikan dukungan.	Partisipasi Masyarakat Desa Mulyorejo 1 dalam pembangunan Desa dapat berjalan dengan baik, terlaksananya pembangunan tersebut selain ikut terlibat masyarakat memberikan bantuan berupa tenaga dan pemikiran yang sehat.

3.	Sarah Nuramalia Putri	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa ( Studi Kasus Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung).	Keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pemikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah.	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa sangat baik, dalam bentuk pemberian ide/gagasan pada kategori tinggi, sumbangan tenaga kerja , dalam bentuk dana .
4.	Wahyuddin	Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju	1. Konsultasi dalam bentuk jasa. 2. Sumbangan spontan berupa uang atau barang. 3. Sumbangan dalam bentuk kerja. 4. Aksi masa.	Partisipasi masyarakat pada pembangunan fisik maupun non fisik telah cukup aktif. Partisipasi aktif dapat dilihat dari masyarakat secara

		Kabupaten Gowa.	5. Mendirikan proyek yang bersifat berdikari.	menyeluruh dalam pembanguna Desa. Penelitian tersebut pembangunan lebih banyak memberikan fokus pada tahap perencanaan (wahyudin)
--	--	--------------------	---	---

5.	Dwi Nurhasana	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponegoro.	Bentuk Partisipasi : 1. Sumbangan berupa uang atau barang. 2. Sumbangan Tenaga dan pemikiran. 3. Bertindak bersama.	Dalam pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur jalan masyarakat merasa diuntungkan karena memberi manfaat banyak kepada masyarakat seperti mempermudah akses ke pertanian masyarakat dan dengan mudah membawa hasil panen dari kebun sampai kerumah. Masyarakat juga terlibat dalam
----	------------------	--	---	--

				merawat dan menjaga hasil pembangunan berupa kerja bakti yang dilakukan secara gotong royong.
--	--	--	--	---

#### 2.4 Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan menghindari kesalahan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca mudah memahami maksud dan tujuan penulis, di antaranya :

- a. Kebijakan adalah suatu yang benar-benar telah di lakukan dan bukan yang akan di lakukan.

- b. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk di pahami, yang bermakna bahwa setiap hal-hal yang di kerjakan adalah untuk mencapai tujuan nasional.
- c. Partisipasi adalah kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari suatu kegiatan untuk memperoleh manfaat.
- d. Bentuk Partisipasi adalah keturutsertaan masyarakat dalam memberikan gagasan/ide atau pemikiran dalam perumusan dan pembuatan sebuah keputusan serta sumbangan materil dan moril dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.
- e. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang menempati wilayah tertentu dan membina kehidupan bersama dalam berbagai aspek kehidupan atas dasar norma sosial tertentu dalam waktu yang cukup lama.
- f. Pembangunan adalah merupakan suatu proses, berarti suatu keinginan yang terus menerus dilaksanakan.
- g. Pembangunan Desa adalah suatu proses dimana organisasi atau masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudaian mereka merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- h. Partisipasi dalam pengambilan keputusan pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak.

- i. Pelaksanaan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
- j. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Maka dalam rangka mengukur dimensi keterlibatan masyarakat pengawasan dan evaluasi pembangunan meliputi, pertama, adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan, kedua, keaktifan dalam melakukan pengawasan, dan ketiga, pemberian kritik dan saran dari masyarakat.
- k. Pemanfaatan hasil merasakan manfaat dalam program yang ditetapkan, dan menggunakan fasilitas yang telah dibangun, keberhasilan program sesuai kualitas yang di inginkan.

## 2.5 Operasional Variabel

Selanjutnya penulis akan menjelaskan konsep operasional variabel penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

**Tabel 2.3**  
**Operasional Variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan**  
**Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan**  
**Kampar Kiri Kabupaten Kampar.**

I.Konsep	II.Variabel	III.Indikator	IV.Sub Indikator
<p>Konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Mardikanto (2014). Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.</p>	<p>Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman.</p>	<p>a. Perencanaan/pengambilan keputusan</p>	<p>1. Program penyelenggaraan pembangunan (Informan Kepala Desa Teluk Paman)</p> <p>2. Landasan penyelenggaraan pembangunan (Informan SekDes Desa Teluk Paman)</p> <p>3. Peraturan Desa dan Penyusunan RPJMDes (Informan Kaur Pembangunan Desa Teluk Paman)</p>

		b. Pelaksanaan kegiatan	<p>4. Sumber dana penyelenggaraan pembangunan (Informan BPD Desa Teluk Paman)</p> <p>5. Partisipasi Masyarakat dalam memberikan pendapat (Informan Tokoh Adat)</p> <p>6. Kehadiran Masyarakat dalam rapat perencanaan pembangunan (Informan Masyarakat)</p> <p>1. Bentuk Pelaksanaan</p>
--	--	-------------------------	--

		pembangunan	penyelenggaraan pembangunan (Informan Kepala Desa Teluk Paman) 2. Realisasi penyelenggaraan pembangunan (Informan SekDes Desa Teluk Paman) 3. Prioritas penyelenggaraan pembangunan (Informan Kaur Pembangunan Desa Teluk Paman) 4. Upaya menarik minat masyarakat berpartisipasi (Informan BPD Desa Teluk
--	--	-------------	--

		<p>c. Evaluasi kegiatan</p>	<p>Paman)</p> <p>5. Pendekatan/ sosialisai penyelenggraan pembangunan (Informan Tokoh Adat)</p> <p>6. Kepedulian/perha tian dalam melaksanakan pembangunan (Informan Masyarakat)</p> <p>1. Pemeriksaan / peninjauan pembanguan oleh pihak berwenang (Informan Kepala Desa Teluk Paman)</p> <p>2. Keterlibatan pihak ketiga</p>
--	--	-----------------------------	--

			<p>dalam peninjauan (Informan SekDes Desa Teluk Paman)</p> <p>3. Kritik dan saran masyarakat (Informan Kaur Pembangunan Desa Teluk Paman)</p> <p>4. Perbaikan program penyelenggaraan pembangunan (Informan BPD Desa Teluk Paman)</p> <p>1. Manfaat dalam program yang ditetapkan (Informan Masyarakat dan</p>
--	---	--	--

			Kepala Desa)
			2. Tingkat kepuasan masyarakat (Informan Masyarakat)
			3. Keberhasilan program sesuai kualitas (Informan Masyarakat)

*Sumber : Modifikasi Penulis 2020*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan yang sebagaimana adanya di lapangan sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang di teliti sehingga memperoleh hasil terhadap masalah (Sugiyono, 2012:80). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat di capai dengan menggunakan prosedur statistika. Penelitian kualitatif menekankan pada suatu hal penting, seperti kejadian, fenomena maupun gejala sosial (Ghony, 2016: 25).

Dengan kata lain, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisa statistik, sudah jelas bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada upaya untuk membangun penelitian yang rinci, di bentuk dengan kata-kata, gambaran yang lengkap dan rumit karena menyangkut kehidupan sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang teliti.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih objek penelitian pada Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Alasan lain yang mendorong peneliti melakukan penelitian pada Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bidang pembangunan. Proses pengumpulan data penulis dapatkan berdasarkan informasi dan data yang di peroleh di lokasi penelitian.

### 3.3 Key Informan dan Informan

#### 1. Key informan

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

#### 2. Informan

Informan adalah orang yang berada dalam ruang lingkup penelitian dan mengetahui mengenai latar penelitian yang penulis lakukan. Penulis memilih beberapa informan yang dianggap cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini informan yang di tetapkan tidak terbatas dengan jumlah informan yang telah ditentukan sebelumnya. Informan dalam penelitian ini akan terus bertambah jika penulis

merasa belum sepenuhnya mendapatkan jawaban yang tepat sesuai dengan penelitian ini.

Berikut ini adalah informan yang peneliti tetapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, yaitu :

- a. Sekretaris Desa Teluk Paman
- b. Kaur Pembangunan Desa Teluk Paman
- c. Pemuda Desa Teluk Paman
- d. Tokoh Masyarakat Teluk Paman
- e. Ketua BPD
- f. Ibu PKK

#### **3.4 Teknik Penarikan Informan**

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dari informan, peneliti menggunakan teknik penarikan informan yaitu teknik penarikan *snow ball*. Teknik penarikan ini yaitu penetapan beberapa orang sebagai informan dan memungkinkan untuk mengambil atau menggantinya dengan informan lain apabila informan yang telah di tetapkan sebelumnya tidak memenuhi kebutuhan atau jawaban yang di berikannya masih simpang siur, maka informan ini akan bertambah sampai data yang di butuhkan oleh peneliti telah sesuai dengan yang di harapkan.

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang menguntungkan karena tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Berdasarkan metode penelitian yang telah penulis sebutkan di atas, maka data yang di kumpulkan dalam :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari objek penelitiannya langsung atau yang disebut dengan responden. Responden yaitu orang yang di teliti untuk di mintai keterangan atau informasinya melalui observasi. Data primer yang ingin di peroleh yaitu data yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Diantaranya tanggapan responden melalui data hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang di perlukan oleh peneliti untuk menjelaskan permasalahan yang di teliti. Adapun data sekunder berupa undang-undang, buku-buku, jurnal dan laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang di butuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah srtaegis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data yang akurat da susai dengan yang di butuhkan oleh peneliti, sehingga tanpa teknik

pengumpulan data peneliti akan sulit untuk mendapatkan data yang mendukung tujuan penelitian (Sugiyono, 2016:224).

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan atau fakta-fakta yang di peroleh langsung oleh peneliti berdasarkan pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti mengamati langsung objek yang akan di teliti sehingga peneliti dapat menilai mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pembicaraan yang di lakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menemukan permasalahan yang akan di teliti. Menurut Gorden (1992) mendefinisikan wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan atau menggali informasi untuk suatu tujuan tertentu. Menurut Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa hal yang harus diperhatikan oleh ketika menggunakan teknik wawancara adalah sebagai berikut:

- 1) Responden adalah orang yang paling tahu dengan dirinya sendiri.
- 2) Memastikan bahwa yang di nyatakan responden kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- 3) Bahwa interpretasi responden tentang pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang di maksudkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln (1981: 232-235) mendefinisikan dokumentasi adalah segala sesuatu dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk hasil media yang di peroleh oleh peneliti.

### 3.7 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan bahan-bahan lainnya secara sistematis sehingga dapat di pahami dan di informasikan kepada orang lain.

Menurut Gunawan (2013:209) analisis data adalah kegiatan mengelompokkan, mengatur, mengkategorikan, mengurutkan, dan memberikan tanda atau kode untuk memperoleh suatu temuan terhadap masalah yang ingin di jawab. Dengan aktivitas tersebut data yang semula masih tidak beraturan dapat di sederhanakan dan kemudian mudah untuk di pahami. Analisis data kualitatif sejatinya sudah dapat di lakukan secara bersamaan ketika proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan tersebut dilakukan sebelum dan sesudah pengumpulan data.

### 3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal dan kegiatan dalam usulan penelitian yang penulis lakukan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Teluk Paman, mulai dari penyusunan rencana, menetapkan

judul, proses pelaksanaan, hingga menjadi sebuah usulan peneliti semestinya. Adapun rencana jadwal kegiatan penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar kiri Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.**

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																															
		Jan				Feb				Mar				Apr				Jun				Jul											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																												
2	Seminar UP							■																									
3	Revisi UP											■																					
4	Revisi Kuesioner											■	■																				
5	Analisis Data															■	■																
6	Bimbingan Skripsi																			■	■	■	■										
7	Revisi Skripsi																							■	■	■	■						
8	Acc Skripsi																											■					



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Berdirinya Desa Teluk Paman

Pada zaman dahulu kala Kampung tongah masih berupa sebuah imbo gano (hutan Rimba) yang mana belum ada penghuninya. Pada suatu masa yang belum diketahui tahun berapa Masehi datanglah sebuah keluarga ke daerah ini yang kemudian mereka berinisiatif membabat imbo gano tersebut menjadikannya pemukiman, lahan perkebunan.

Seiring dengan berkembangnya zaman, sang kakek tersebut sudah beranak cucu di kampung tongah tersebut, maka timbullah inisiatif dari Desa tetangga untuk mengajak sang kakek untuk masuk ke wilayah administratif desa tetangga, di antaranya ajakan dari desa Kuntu dan dari desa Lipat Kain, namun karna sudah nyaman, sang kakek tidak menerima ajakan kedua kampung tersebut, karna diamnya kakek tersebut, maka dinamakanlah kampung tersebut dengan nama kampung tongah yang berarti kampung yang berada di tengah, di antara dua desa.

Dengan seiring berjalannya waktu lama kelamaan mulai ramai orang-orang berdatangan dan menetap di daerah tersebut. Dan pada tahun yang belum diketahui secara pasti juga kampung tongah berubah nama menjadi Desa Teluk Paman.

- a. Terdiri dari 4 Dusun :
  1. Dusun Teluk Paman
  2. Dusun Muallimin

3. Dusun Kampung Tengah

4. Dusun Suka Menanti

Terdiri dari 8 RW/16 RT

#### 4.2 Keadaan Penduduk

Dari data monografi kantor Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar pada tahun 2020, penduduk Desa Teluk Paman berjumlah 1.221 jiwa, yang terdiri dari 318 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri**  
**Kabupaten Kampar**

Kepala keluarga	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
	Laki-Laki	Perempuan	
318	638	583	1.221

*Sumber : Kantor Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2020*

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk laki-laki lebih banyak yaitu berjumlah 638 jiwa sedangkan untuk penduduk perempuan berjumlah 583 jiwa.

Selanjutnya Pada Tabel 4.2 dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, yang dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu : untuk penduduk yang berumur 0-14 tahun berjumlah 329, sedangkan umur 15-65 tahun berjumlah 858, kemudian penduduk yang berumur >65 tahun sebanyak 34. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Teluk Paman Berdasarkan Umur**

NO	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	0 – 14 tahun	329	27.0
2	15 – 65 tahun	858	70.3
3	>65 tahun	34	2.7
<b>Jumlah</b>		<b>1.221</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Kantor Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2020*

#### 4.3 Agama/ Keyakinan

Penduduk Desa Teluk Paman 100 % memeluk agama Islam yang merupakan agama Islam yang dianut oleh nenek moyang sebelumnya. Oleh karena itu agama yang dianut oleh masyarakat adalah agama Islam yang sangat menjwai dan merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara mengenai kepercayaan atau agama tidak terlepas dari sarana peribadaan di Desa Teluk Paman untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Sarana Ibadah Penduduk Desa Teluk Paman**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Musholla	3
3	Madrasah Diniyah Awaliyah	1
4	Taman Pendidikan Al-Quran	4
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>

*Sumber : Kantor Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Desa Teluk Paman mempunyai sarana ibadah yang terdiri dari 2 Mesjid, 3 Musholla, 1 Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), dan 4 Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

#### 4.4 Gambaran Umum Demografis

##### a. Luas

1. Luas Desa Teluk Paman : 12.000 Ha
2. Kantor desa : 0.9 Ha
3. Tanah kuburan : 2.5 Ha
4. Tanah lapangan : 0.8 Ha
5. Tanah masjid / mushalla : 2.0 Ha
6. Tanah pemerintah Kab/Prov : 2.0 Ha

##### b. Batas Desa

1. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tanjung Harapan
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Teluk Paman Timur
3. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupate Kuantan Singingi
4. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Kuntu

##### c. Ekonomi Masyarakat

1. Jumlah angkatan kerja : 619 jiwa
2. Jumlah usia sekolah : 358 jiwa
3. Jumlah ibu rumah tangga : 341 jiwa
4. Bayi : 36 jiwa
5. Usia non produktif / lansia : 34 jiwa

#### 4.5 Pendidikan

Tingkat Pendidikan masyarakat desa teluk paman kecamatan Kampar kiri kabupaten Kampar pada umumnya sudah baik, hal ini dibuktikan dengan edikitnya penduduk yang buta huruf, walaupun masih ada ditemui masyarakat yang tidak tamat sekolah dasar (SD). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

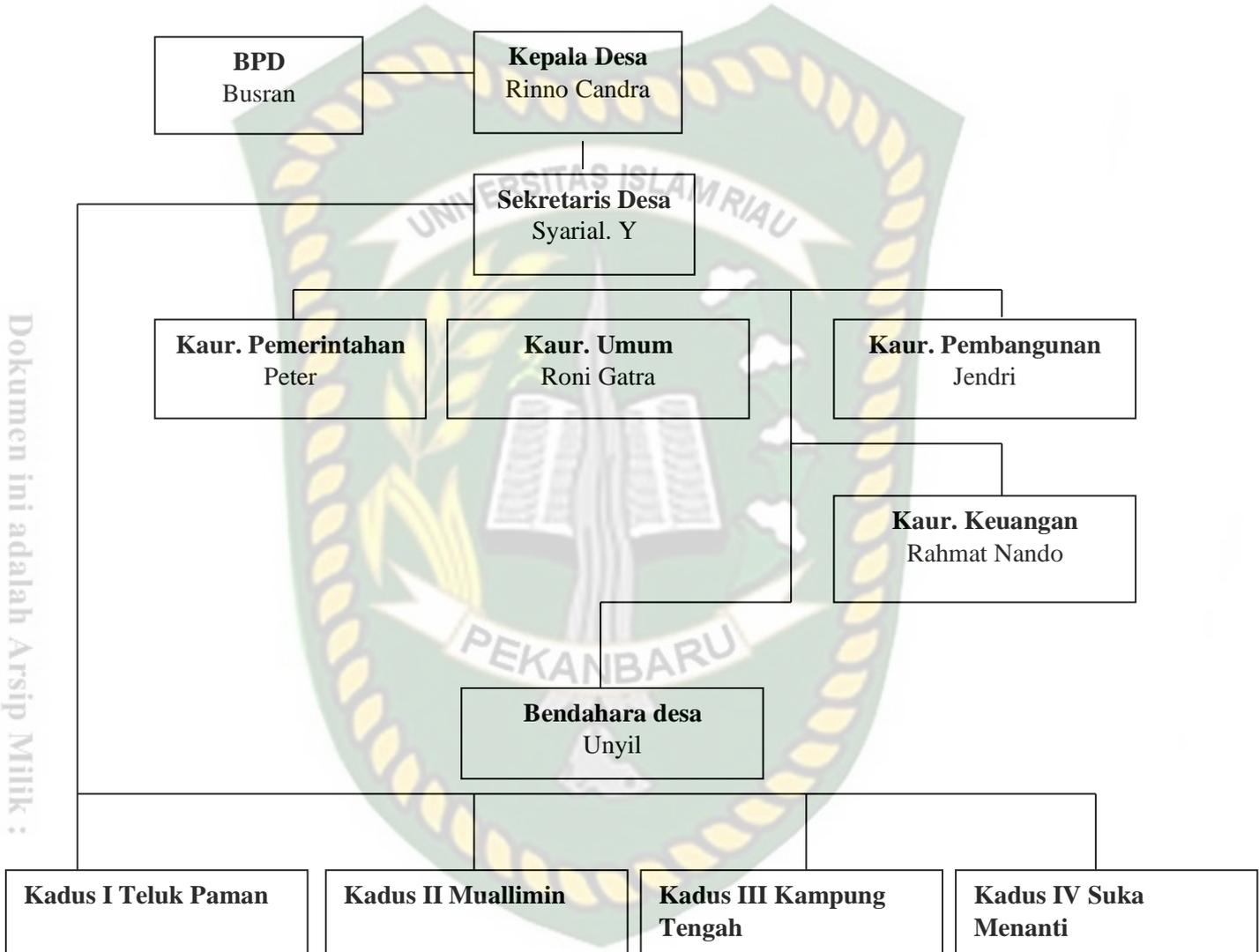
**Tabel 4.4**  
**Tingkat Pendidikan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri**  
**Kabupaten Kampar**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Balita	111
2	Paud	32
3	Play group	15
4	TK	22
5	SD	475
6	SMP	311
7	SMA	143
8	Sarjana	35
<b>Jumlah</b>		<b>1.144</b>

*Sumber : Kantor Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2020*

#### 4.6 Sruktur Desa

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar**



*Sumber : Kantor Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2020*

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, hasil pengamatan dan wawancara serta penelusuran literatur dan dokumen dengan indikator penelitian yang telah ditetapkan.

#### 5.1 Identitas Responden

1. Nama : Rinno Candra  
Jabatan/Pekerjaan: Kepala Desa Teluk Paman  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : S1  
Umur : 39 Tahun
2. Nama : Syarial. Y  
Jabatan/Pekerjaan: Sekdes Desa Teluk Paman  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : S1  
Umur : 40 Tahun
3. Nama : Jendri  
Jabatan/Pekerjaan: Kaur Pembangunan  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SMA

Umur : 42 Tahun

4. Nama : Ibusran

Jabatan/Pekerjaan: Ketua BPD

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SMA

Umur : 56 Tahun

5. Nama : Kadarman

Jabatan/Pekerjaan: Ketua Pemuda

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SMA

Umur : 40 Tahun

6. Nama : ABD. Kani

Jabatan/Pekerjaan: Tokoh Masyarakat

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SMA

Umur : 58 Tahun

7. Nama : Roni Gatra

Jabatan/Pekerjaan: Kaur Umum

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S1

Umur : 34 Tahun

## **5.2 Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar**

Partisipasi adalah keikutsertaan, perhatian dan sumbangan yang diberikan oleh kelompok yang berpartisipasi, dalam hal ini adalah masyarakat, Pasaribu (1992). Untuk menumbuhkan dan menggerakkan semangat partisipasi, diperlukan prasyarat yang dapat membangkitkan tenaga sosial dalam masyarakat.

Pasaribu (1992) mengemukakan sebagai berikut:

- f. Rasa senasib, sepenanggungan, ketergantungan dan ketertiban, jika dalam suatu masyarakat terdapat perasaan ini, maka dalam masyarakat ikut dapat diharapkan timbul partisipasi yang tinggi.
- g. Keterikatan tujuan hidup, keterikatan rasa saja tidak membawa kekuatan untuk berpartisipasi. Bukti nyata dalam hal ini, makan tidak makan asal rumput tetapi bila tujuan jelas maka ketepatan hati, tahan uji dan kemauan keras akan timbul dalam mencapai tujuan.

- h. Kemahiran menyesuaikan. Kemahiran menyesuaikan diri dalam keadaan sangat penting untuk menimbulkan partisipasi.
- i. Adanya prakarsawan, adanya orang yang memprakarsai perubahan, merupakan memprasyarat lahirnya partisipasi.

Iklm partisipasi, partisipasi yang bagaimanapun tidak akan lahir tanpa lebih dahulu menciptakan iklim tetapi bila iklimnya sudah ada, maka sangat mudah partisipasi tumbuh.

Dari uraian di atas sudah terlihat jelas bahwa ada beberapa konsep tentang yang di maksud tentang partisipasi. Partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat menyesuaikan diri, memberi ide atau masukan dan juga bekerjasama dalam penyelenggaraan pembangunan di suatu desa.

Keberhasilan dan juga terlaksananya pembangunan di suatu desa tidak terlepas dari keinginan, persetujuan dan juga partisipasi masyarakat, karena pada dasarnya tujuan pembangunan yang di maksudkan pemerintah adalah untuk pelayanan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut, pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah telah memberikan kebebasan dalam mengatur sendiri wilayahnya seseuai Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2014 Pasal 1 di sebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Mardikanto (2014) adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Masih menurut Mardikanto (2014) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari suatu kegiatan untuk memperoleh manfaat, menurut kamus sosiologi tersebut bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri dalam Yuwono (2006). Penegertian yang ada dan berlaku secara menyeluruh, yaitu keturutsertaan masyarakat dalam pembangunan merupakan kerja sama yang erat antara perencana dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, melaksanakan, evaluasi, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai (Soetrisno : 1995).

Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian partisipasi, dalam hal ini partisipasi masyarakat membantu pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pembangunan di suatu desa untuk melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Mengenai partisipasi ini, selanjutnya ada beberapa jenis partisipasi adalah sebagai berikut (Sastropetro : 1986):

- a. Partisipasi menggunakan pikiran (*psycological partisipation*)
- b. Partisipasi menggunakan tenaga (*physical partisipation*)
- c. Partisipasi menggunakan pikiran dan tenaga (*activepartisipation*)
- d. Partisipasi menggunakan keahlian (*with skill partisipation*)
- e. Partisipasi menggunakan barang (*material partisipation*)

- f. Partisipasi menggunakan uang (*money participation*)
- g. Partisipasi menggunakan jasa (*services participation*)

Telaah tentang partisipasi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa partisipasi, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan atau keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam maupun dari luar dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pemanfaatan hasil yang di capai. Totok Mardikanto dan Subianto (2015:83,84) mengemukakan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdiri atas :

- e. Partisipasi dalam pengambilan keputusan pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dapat diukur dari : 1) Keterlibatan dalam rapat atau musyawarah, 2) Kesiediaan dalam Memberikan Data dan Informasi, 3) Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan.
- f. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Partisipasi dalam pembangunan, sering kali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dapat diukur dari : 1) keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, 2) kesedian

memberikan sumbangan berupa pikiran, 3) kesedian memberikan sumbangan uang, materi dan bahan-bahan penunjang pembangunan.

- g. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. maka dalam rangka mengukur dimensi keterlibatan masyarakat pengawasan dan evaluasi pembangunan meliputi, pertama, adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan, kedua, kaeaktifan dalam melakukan pengawasan, dan ketiga, pemberian kritik dan saran dari masyarakat.

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil merupakan unsur terpenting yang sering dilupakan sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Dimensi keterlibatan dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan meliputi : 1) kesediaan dalam menerima dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, 2) kesedian dalam melestarikan hasil-hasil pembangunan, 3) kesediaan dalam mengembangkan hasil-hasil pembangunan. Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas, partisipasi sebagai alat komunikasi. Partisipasi didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.

Pada penelitian ini, untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar,

maka penulis menetapkan beberapa indikator yang menjadi tolak ukur sebagai berikut:

#### **A. Perencanaan/Pengambilan Keputusan**

Adapun perencanaan/pengambilan keputusan dalam penelitian ini adalah program penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman, landasan penyelenggaraan pembangunan, Perdes tentang penyelenggaraan pembangunan, Asal dana untuk penyelenggaraan pembangunan, Masyarakat ikut memberikan ide atau gagasan dalam penyelenggaraan pembangunan, Masyarakat di undang dalam rapat penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) di Desa Teluk Paman.

Dengan demikian jelaslah bahwa partisipasi masyarakat untuk perencanaan/pengambilan keputusan penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman sangat diperlukan agar terlaksana dan berhasilnya suatu program pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Program penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman ada beberapa program, dalam wawancara yang penulis lakukan bersama Kepala Desa Teluk Paman pada tanggal 05 Januari 2021 menyatakan bahwa :

*“Program penyelenggaraan pembangunan pada desa teluk paman dilakukan secara bertahap. Adapun program penyelenggaraan pembangunan adalah pembangunan infrastruktur semenisasi jalan setelah itu dilanjutkan dengan MCK dan pembangunan dermaga.”*

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman ada beberapa program seperti semenisasi jalan, Pembangunan MCK dan Pembuatan dermaga.

Selanjutnya yang menjadi landasan penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, sesuai dengan wawancara penulis dengan Sekdes Desa Teluk Paman Syarial. Y pada tanggal 06 Januari 2021 mengatakan bahwa :

*“Landasan dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman yaitu berdasarkan pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014.”*

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan secara keseluruhan terpaku pada Undang-Undang yang yang berlaku dan hal itu juga menjadi legalitas dan penetapan khusus dalam melaksanakan pemerintahan di Desa Teluk Paman.

Dalam penyelenggraan program pembangunan di Desa Teluk Paman di atur dan di tetapkan dalam Perdes yang di jelaskan dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa Teluk Paman, wawancara penulis dengan Kaur Pembangunan Desa Teluk Paman Jendri pada tanggal 06 Januari 2021 mengatakan bahwa :

*“Penyelenggaraan program pembanguan di Desa Teluk Paman di atur dalam Perdes tentang rencana penyelenggaraan pembangunan jangka menengah pada BAB I Pasal 1 ayat 15 adalah : Rencana pembangunan*

*jangka menengah Desa yang di sebut RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.*

Dari wawancara di atas jelaslah bahwa penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman di atur dalam Perdes pada BAB I Pasal 1 Ayat 15 yang berbunyi “*Rencana pembangunan jangka menengah Desa yang di sebut RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun*”.

Selanjutnya mengenai asal dana penyelenggaraan program pembangunan di Desa Teluk Paman. Wawancara penulis pada tanggal 03 Februari 2021 dengan ketua BPD Desa Teluk Paman Ibusran menyatakan bahwa:

*“Seluruh penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Teluk Paman menggunakan Dana Desa (DD) yang telah dikonfirmasi dengan pihak BPD Desa Teluk Paman.”*

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa seluruh pembangunan yang ada di Desa Teluk Paman dibiayai menggunakan anggaran Dana Desa (DD) yang ada yang sudah disetujui oleh pihak BPD.

Untuk lebih jelasnya penggunaan biaya tentang biaya pembangunan menggunakan Dana Desa (DD) salah satunya tentang penggunaan biaya pembangunan MCK Dusun I Teluk Paman dapat di lihat dalam lampiran skripsi ini.

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman bagaimana masyarakat memberikan ide/gagasan, wawancara dengan tokoh masyarakat setempat Bapak ABD. Kani pada tanggal 05 Februari 2021 menyatakan bahwa :

*“Masyarakat juga ikut dalam memberikan ide/gagasan dalam penyelenggaraan pembangunan, namun tidak semua masyarakat aktif dalam memberikan ide/gagasan.”*

Selanjutnya dalam rapat perencanaan penyelenggaraan pembangunan atau rapat penyusunan RPJMDes masyarakat di undang dalam rapat, sesuai dengan pengakuan salah seorang pemuda Desa Teluk Paman Sdr. Kadarman pada tanggal 03 Februari 2021 mengatakan bahwa :

*“Sebagian masyarakat di undang dalam rapat namun ada yang tidak dapat hadir mungkin karena waktu dan ada kegiatan lain yang harus mereka lakukan.”*

Dari penjelasan diatas jelaslah bahwa dalam kegiatan rapat penyusunan rencana penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman masyarakat di undang, namun ada yang tidak hadir karena ada kegiatan lain yang ia lakukan.

## **B. Pelaksanaan kegiatan pembangunan**

Pelaksanaan penyeleggaraan program pembangunan di Desa Teluk Paman dalam penelitian ini adalah bentuk penyelenggraan program pembangunan, Realisasi penyelenggaraan program pembangunan di Desa Teluk Paman, Prioritas pembangunan, Upaya pemerintahan Desa dalam menarik minat masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman, Upaya sosialisai yang dilakukan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pembangunan, perhatian pemerintahan desa terhadap kepentingan masyarakat dalam melakukan pembangunan.

Dalam pembangunan nasional, desa memegang peranan yang sangat penting, sebab desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan Indonesia. Setiap jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara pada pembangunan desa sebab pembangunan di Indonesia tidak akan ada artinya tanpa membangun desa. Sebagaimana wujud demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintah desa dibentuk badan pemusyawaratan desa atau sebutan sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan desa.

Penyelenggaraan program pembangunan di Desa Teluk Paman ada beberapa bentuk program sesuai kebutuhan masyarakat, wawancara penulis dengan Kepala Desa Teluk Paman Rinno Candra pada tanggal 05 Januari 2021 menyatakan bahwa :

*”Penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman ada beberapa jenis pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat seperti : Semenisasi jalan, Pembangunan MCK, Pembuatan dermaga, Pembuatan drainase dan lain-lain.”*

Dari pernyataan diatas jelaslah bahwa di Desa Teluk Paman ada beberapa jenis pembangunan yang dilaksanakan.

Selanjutnya penyelenggaraan program pembangunan di Desa Teluk Paman terealisasi dengan baik meskipun ada beberapa kendala, wawancara penulis pada tanggal 06 Januari 2021 dengan Sekdes Desa Teluk Paman Syarial. Y mengatakan bahwa :

*“Beberapa penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman sudah baik, sudah terlaksana tetapi, ada beberapa pembangunan seperti semenisasi jalan yang mendapatkan kendala, karena tanah yang akan di semenisasi merupakan masih tanah masyarakat dan ada beberapa tempat yang akan di semenisasi masyarakat tidak mau mewakafkan atau menjual tanahnya sedikit untuk jalan semenisasi. Hal inilah yang membuat pembangunan menjadi terkendala.”*

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman berjalan dengan semestinya meskipun ada kendala dalam menjalankan program pembangunan tersebut.

Dalam penyelenggaraan program pembangunan di Desa Teluk Paman ada beberapa hal yang menjadi prioritas, wawancara penulis masih dengan Kaur Pembangunan Desa Teluk Paman Jendri pada tanggal 06 Januari 2021 menyatakan bahwa :

*“Adapun yang menjadi prioritas pembangunan di Desa Teluk Paman adalah pembangunan MCK dan semenisasi jalan. Seperti pembangunan MCK di Dusun II Kampung Tengah dan Semenisasi jalan di Dusun IV Suka Menanti.”*

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa yang menjadi prioritas penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman adalah Pembangunan MCK dan Semenisasi Jalan.

Dalam hal penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman bagaimana partisipasi masyarakat, wawancara penulis dengan Ketua BPD Desa Teluk Paman Ibusran pada tanggal 03 Februari 2021 mengatakan bahwa :

*”Partisipasi masyarakat Desa Teluk Paman dalam hal pembangunan masih terbilang kurang berpartisipasi, hal ini dapat dilihat dari kehadiran peserta rapat beberapa acara tentang program penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman. Namun dalam prosesnya masyarakat sangat antusias untuk berpartisipasi (bekerja) karena mengaharap upah harian atau gaji dalam suatu proyek pembangunan.”*

Dari pernyataan di atas jelaslah bahwa masyarakat Desa Teluk Paman masih kurang berpartisipasi dalam acara rapat rencana penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman apakah Pemerintahan Desa melakukan sosialisai sebelum melaksanakan pembangunan di Desa Teluk Paman, wawancara penulis dengan salah seorang tokoh adat masyarakat ABD. Kani pada tanggal 05 Februari 2021 mengatakan bahwa :

*“Pemerintahan Desa Teluk Paman mengadakan sosialisasi dalam rapat acara penyelenggaraan pembangunan dalam Musrembang dengan masyarakat. Sebelum rencana pembangunan mulai di sebutkan Pemerintahan Desa di dampingi BPD dan Pengawas Desa mealakukan sosialisasi terlebih dahulu apa saja yang di perbolehkan dan apa saja*

*yang sesuai arahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan bagaimana tatacara pelaksanaannya.”*

Hal ini juga senada dengan yang di sampaikan salah satu Pemuda masyarakat Desa Teluk Paman pada tanggal 03 Februari 2021 mengatakan:

*“Kepala desa mengundang masyarakat dalam rapat yang membahas tentang penyelenggaraan program pembangunan. Selain itu di kantor kepala desanya juga sudah terpasang spanduk atau baliho tentang penggunaan dana desa secara menyeluruh, sehingga masyarakat yang tidak bisa hadir dalam rapat bisa melihat apa saja program pembangunan di spanduk tersebut.”*

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa selain mengundang secara langsung untuk mensosialisaikan program dana desa, pemerintah desa teluk paman juga mengantisipasi dengan pemasangan baliho atau spanduk yang berisikan tentang penggunaan program dana desa dengan rinci supaya tidak ada tanggapan lain yang beredar di masyarakat. Hal ini sangat memudahkan masyarakat dalam mengetahui apa saja program pembangunan yang di adakan di Desa Teluk Paman.

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Teluk Paman Rinno Candra pada tanggal 05 Januari 2021 di dapatkan hasil bahwa:

*“Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh kepala desa selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan musrembang. Tetapi masih banyak masyarakat yang tidak aktif datang dalam undangan sosialisasi tersebut.”*

Dari pernyataan di atas bahwa setiap kegiatan dalam pembangunan maupun membahas tentang program program pembangunan Pemerintahan Desa selalu melibatkan masyarakat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya transparan pada pemerintahan desa terhadap masyarakat. Tetapi masih kurangnya masyarakat yang datang ke sosialisasi yang di adakan pemerintah desa, hal ini mungkin dikarenakan masyarakat bekerja pada pagi hari.

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa melakukan sosialisai terlebih dahulu sebelum memutuskan apa saja program pembangunan yang akan di adakan di Desa Teluk Paman.

Dalam hal penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman bagaimana sikap pemerintahan desa mementingkan masyarakat dalam penyelenggraan pembangunan, menurut salah seorang pemuda masyarakat yang penulis wawancara Kadarman pada tanggal 03 Februari mengatakan bahwa :

*"Pemerintahan Desa sebenarnya sangat mementingkan masyarakat, namun setiap keputusan pasti mengundang pro-kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju sehingga penyelenggraan pembangunan menjadi terhambat."*

Dari penjelasan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pemerintah desa mementingkan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

### **C. Evaluasi**

Evaluasi dalam penyelenggaraan program pembangunan di Desa Teluk Paman ini adalah pemeriksaan oleh pihak tertentu dalam penyelenggaraan pembangunan, Keterlibatan pihak ketiga dalam penyelenggaraan pembangunan di

Desa Teluk Paman, Kritik dan saran masyarakat setelah penyelenggaraan pembangunan, Pemerintah desa dalam melakukan perbaikan kinerja tentang penyelenggaraan pembangunan, di dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman ada keterlibatan pihak swasta.

Dalam penyelenggaraan program pembangunan di Desa Teluk Paman tentu ada badan pemeriksa/peninjau dari pihak-pihak tertentu, seperti yang disampaikan Kepala Desa Teluk Paman Rinno Candra yang penulis wawancara pada tanggal 05 Januari 2021 mengatakan bahwa :

*“Penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman di periksa langsung oleh pihak Kecamatan Kampar Kiri untuk di proses di ukur dan di sesuaikan dengan RAB yang telah di putuskan.”*

Dari penjelasan yang di sampaikan di atas jelaslah bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Desa Teluk Paman juga memiliki badan pemeriksa/ atau peninjau.

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Sekdes Desa Teluk Paman Syarial. Y pada tanggal 06 Januari 2021 mengatakan bahwa :

*“Setelah penyelenggaraan pembangunan selesai di laksanakan, maka pemeriksaan pun di lakukan oleh pihak ketiga atau pihak Kecamatan.”*

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman masyarakat ikut terlibat, ada beberapa kritik dan saran yang di sampaikan langsung. dalam wawancara penulis dengan Kaur Pembangunan Desa Teluk Paman pada tanggal 06 Januari 2021 Jendri mengatakan bahwa :

*“Dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman masyarakat ikut terlibat dalam memberikan kritik dan saran serta solusi seperti Ninik Mamak pemuka adat dan Tokoh Masyarakat.”*

Dari wawancara diatas dapat di ketahui bahwa dalam penyelenggaran program pembangunan di Desa Teluk Paman masyarakat ikut terlibat.

Senada dengan yang di sampaikan Kaur Umum Desa Teluk Paman Roni Gatra pada tanggal 06 Januari 2021 menyatakan bahwa :

*“Masyarakat ikut terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman namun hanya sebagian kecil saja tidak sebagian besar masyrakat ikut terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman.*

Dari pernyataan diatas terungkaplah bahwa masyarakat yang ikut terlibat dalam penyelenggraan pembangunan di Desa Teluk Paman adalah sebagian kecil saja seperti Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan program pembangunan di Desa Teluk Paman tidak ada Pihak Swasta seperti yang di sampaikan Sekdes Desa Teluk Paman dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 06 Januari 2021 menyatakan bahwa :

*“Tidak ada keterlibatan Pemerintahan Desa Teluk Paman dengan pihak swasta karena, pembangunan yang dilakukan di Desa Teluk Paman murni dari permintaan dan kebutuhan masyarakat yang diusulkan dalam rapat musrembang Desa Teluk Paman setiap tahunnya. Dan dalam pembangunan yang dilakukan dikerjakan langsung oleh masyarakat.”*

Dari penjelesan di atas, masyarakat harus berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Teluk Paman, sehingga tidak melibatkan pihak luar sebagai pemegang andil dalam pembangunan. Dan dapat dilihat bahwa masyarakat juga harus sangat peduli akan pembangunan desa yang dilakukan ataupun yang masih direncanakan oleh Pemerintah Desa.

#### **D. Pemanfaatan Hasil**

Pemanfaatan hasil dalam penyelenggaraan program pembangunan di Desa Teluk Paman dalam penelitian ini adalah hasil sosialisasi yang dilakukan dalam meningkatkan keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan, manfaat yang di peroleh masyarakat dengan adanya penyelenggaraan pembangunan di Desa teluk Paman.

Sosialisai yang dilakukan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman terbilang cukup berhasil meningkatkan minat masyarakat dalam berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang di lakukan desa, wawancara penulis dengan Kepala Desa Teluk Paman Rinno Candra pada tanggal 05 Januari 2021 mengatakan bahwa :

*“Pemerintahan Desa selalu mensosialisasikan setiap kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan ini membuat masyarakat semakin berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang di lakukan Pemerintahan Desa, baik dalam rapat dan penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman.”*

Dalam penyelenggaraan program pembangunan di Desa Teluk Paman masyarakat cukup puas karena transparansi yang dilakukan Pemerintahan Desa, sesuai wawancara penulis dengan salah seorang pemuda masyarakat pada tanggal 03 Februari 2021 mengatakan bahwa :

*”Masyarakat merasa cukup puas dengan kinerja Pemerintahan Desa terutama dalam transparansi yang dilakukan, sehingga masyarakat bisa mengetahui program pembangunan dan penggunaan Dana Desa (DD) Desa Teluk Paman.”*

Selanjutnya dengan adanya program pembangunan di Desa Teluk Paman masyarakat dapat memperoleh manfaat, dalam wawancara penulis dengan salah seorang tokoh masyarakat Desa Teluk Paman pada tanggal 05 Februari 2021 Bpk. Abd. Kani mengatakan bahwa :

*“Pembangunan yang dilakukan sangat membantu masyarakat sebut saja seperti pembangunan MCK, Semenisasi Jalan, Pembangunan Dermaga dan lain-lain. Pembuatan dermaga membantu masyarakat yang mata penchariannya sebagai nelayan.”*

Pernyataan diatas menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman memberikan manfaat bagi masyarakat.

### **5.3 Hasi Penelitian dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar**

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar terdapat beberapa hambatan yang di hadapai, yaitu:

#### **A. Kurangnya Kesadaran/Kepedulian Masyarakat**

Kesadaran akan petingnya penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman terbilang masih kurang hal ini dapat di lihat dari hadirnya undangan rapat yang dilakukan pemerintahan desa sehingga hal ini menjadikan penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk menjadi terkendala karena pemerintah desa kurang mengetahui kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan.

#### **B. Kesenjangan Sosial**

Usia atau senioritas menjadikan masyarakat kurang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman, dimana yang leih tua selalu di anggap lebih berpengalaman sehingga pendapat para senior atau yang lebih tua lebih dipilih sebagai keputusan dalam rapat ketimbang mereka yang lebih muda, meskipun sebagian dari mereka lebih berpengalaman.

#### **C. Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan juga menjadi kendala dalam keaktifan partisipasi masyarakat. Penulis mengilustrasikan bahwa sebagian besar masyarakat yang

tergolong aktifitas partisipasinya tinggi ialah mereka yang tamatan SMA keatas, kemudian tamatan SMP kebawah keaktifan berpartisipasi rendah. Sementara sebagian besar masyarakat Desa Teluk Paman tingkat pendidikannya adalah SMP kebawah.

#### **D. Tingkat Penghasilan**

Tingkat penghasilan hal ini mengindikasikan tidak ada perbedaan partisipasi aktif masyarakat Desa Teluk Paman dalam mengikuti Musrenbangdes bila dilihat dari tingkat penghasilan masyarakat. Hasil penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian yang pernah ada. Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.

Asumsi umum adalah masyarakat yang memiliki penghasilan cukup akan lebih memiliki waktu luang dan tidak disibukkan lagi mencari tambahan penghasilan, sehingga mereka lebih aktif terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan Desa.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Hasil dapat dinyatakan dari masing-masing indikator penelitian yakni:

- a. Indikator Perencanaan/Pengambilan Keputusan. Program penyelenggaraan pembangunan Desa Teluk Paman sudah jelas tertuju untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat Landasan Pemerintah Desa Teluk Paman sudah jelas tertuju pada Undang-Undang yang ada. Penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman di atur dalam Perdes. Setiap kegiatan perencanaan pembangunan selalu diadakan rapat dan pemerintah desa mengundang masyarakat.
- b. Indikator Pelaksanaan. Bentuk penyelenggaraan pemabangunan di Desa Teluk Paman berdasarkan kebutuhan masyarakat. Realisasi penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman berjalan lancar meskipun ada kendala. Priorotas pembangunan di Desa Teluk Paman adalah Pembangunan MCK dan semenisasi jalan. Masyarakat masih

belum sepenuhnya ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman.

- c. Indikator Evaluasi. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ikut terlibat meskipun hanya sebagian kecil. Pemerintah melakukan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman tidak ada keterlibatan pihak swasta..
- d. Indikator Pemanfaatan Hasil. Kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman terbilang cukup puas. Pembangunan di Desa Teluk Paman memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Teluk Paman.

## 6.2 Saran

- a. Hendaknya Pemerintahan Desa Teluk Paman lebih meningkatkan sosialisai dalam penyelenggaran pembangunan, sehingga hubungan masyarakat dan pemerintah desa semakin erat.
- b. Pemerintah Desa menerima aspirasi masyarakat dan tidak membedakan pendapat dari tingkat usia maupun tingkat pendidikan. Menentukan waktu yang pas untuk mengadakan rapat sehingga banyak masyarakat yang bisa hadir dalam rapat rencana pembangunan Desa Teluk Paman.
- c. Penelitian ini semoga bermanfaat bagi Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Teluk Paman dan Juga bagi para pembaca yang budiman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006) *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Arifin Tahir, (2014). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Alfabeta.
- Arsito, (2004). *Tradisi Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Yang Demokratis*.
- Bagir Manan, (2001). *Menyongsong Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH), Fakultas Hukum UII.
- Beratha, N.I., (1992) *Desa Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bintoro Tj kroamidjojo, (1986) *Tujuan pembangunan nasional menggerakkan, menguatkan potensi kreatif*.
- Dwiyanto, (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gava Media Yogyakarta.
- Hartoyo, dkk. (1996) *Buku Materi Pokok Konsep Pembangunan Masyarakat Desa*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- Jakob Oetomo, (1984). *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*.
- Kartono, K. (2000) *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mander Maju.
- Leo Agustino, (2012). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta.
- Mardikanto, Totok. (2014) *Coorporate Social Responsibility (Tanggung Jawab*

- Sosial Koorporasi*), Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, Totok. (2015) *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moenir, H.A.S. (2002). *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndaraha, T. (1997). *Metode Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. (2003). *Ilmu Pemerintahan Baru 1 Dan 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. (1990) *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Pasaribu, I.L., dan Simajuntak. B. (1992) *sosiologi Pembangunan*, Tarsito, Bandung.
- Santoso, (2008). *Analisis Kebijakan Publik*, Polgov.
- Sastropetro, Santoso R. (1998). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Alumni Bandung: Bandung.
- Sarundajang, SH. (2002). *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sirajuddin K (1991), *Pengertian partisipasi rakyat Indonesia*.
- Slamet. Y. (1999) *Konsep Dasar Partisipasi Sosial*. PAU-SS, UGM, Yogyakarta.
- Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soetrisno, Loekman. (1995) *Menuju Masyarakat Parisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- S.p. Siagian, (1994). *Pembangunan terus menerus mengalami pertumbuhan dan*

*perubahan.*

Suharto, (2014). *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta Bandung.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunarti. (2003). *Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan perumahan secara kelompok*. Jurnal Tata Loka. Semarang: Planologi UNDIP.

Syafiie, I. K. (2005). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Tangkisilan, (2003). *Kebijakan Publik*, Balairung Yogyakarta.

Yuwono, Semarang. (2016) *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial*. Badan Penerbit Universitas diponegoro.

### **Dokumentasi :**

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang – undang Otonomi Daerah Tahun 2014.

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintah di Daerah.

### **Jurnal :**

Sri Hardianti, Hasan Muhammad dan Muthar Lutfi, (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota)*

Mukhamad Hendra Kurniawan, (2014). *Partisipasi Masyarakat Dalam*

*Pembangunan Infrastruktur Jalan ( Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur pedesaan (PPIP) di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk).*

Martiana Dwi Rahayu, (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan infrastruktur Di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejokabupaten Lampung Tengah.*

Lukmanul Hakim, S.Ag, M.Si, (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang.*

